

BAB II

**KONDISI WILAYAH TANAH BUMBU
PADA PERTENGAHAN ABAD KE-19 HINGGA AWAL ABAD KE-20**

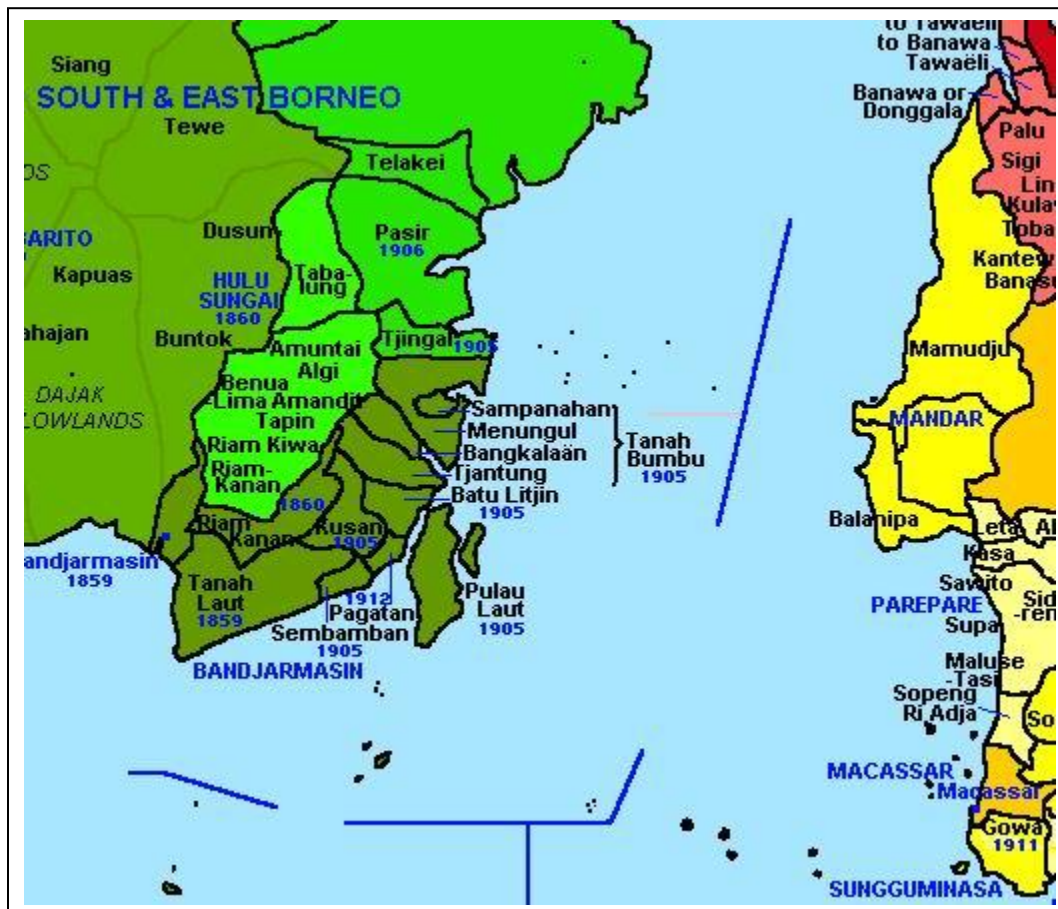
A. Kondisi Geografis

Wilayah Tanah Bumbu pada awalnya merupakan daerah *onderafdeeling* yang dikenal dengan nama *onderafdeeling van Tanah Boemboe* pada tahun 1844. Adapun distrik-distrik yang tergabung dalam wilayah ini yaitu Pagatan, Kusan, Batulicin, Cantung, Bangkalaan, Sampanahan, Manunggal, Buntar Laut, Cengal dan Sebamban. Menurut *Staatsblad* tahun 1849 no.8, wilayah Tanah Bumbu dan daerah Kotawaringin, Sampit, Pembuang, Mendawai, Tanah Laut, Dusun Ilir, Pasir, Kutai, Berau termasuk dalam *Borneo Zuid Ooster Afdeeling* (Afdeeling Borneo Selatan dan Timur) yang beribukota di Banjarmasin.¹ Namun sejak tahun 1898, terjadi perubahan pembagian wilayah lokal administratif, seperti yang terdapat dalam *staatblad* no. 178 tahun 1898. Dalam *staatblad* ini, wilayah Tanah Bumbu menjadi salah satu *afdeeling* yang bernama *Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe* dalam wilayah *Residentie Borneo's*

¹ Pembagian wilayah Borneo ini berdasarkan “Besluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie”, pada tanggal 27 Agustus 1849 No. 8, lihat *Staatsblad van Nederlandisch Indie Voor Het Jaar 1849* (Batavia: Ter Lands Drukkerij, 1849), hlm.1-2. Lihat “De Minister van Staat, Gouverneur Generaal van Nederlandsc Indie”, dalam L.J.A. Tollens, *Verzameling van Wetten, Besluiten, Bepalingen, Kennisgaven, enz, Over de Jaren 1808-1856*, Tweede Deel (Batavia: Lange & Co, 1856), hlm.160. Lihat juga “Het Eiland Borneo en Zijne Bewoners”, dalam J.B.J. van Dooren, *Bijragen tot de Kennis van Verschillende Overzeesche Landen, Volken, enz, Eerste Deel* (Amsterdam: J.D.Sybrandi, 1860), hlm. 241.

Zuid en Oosterafdeeling (Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur).² Posisi Tanah Bumbu di wilayah Karesidenan Borneo Selatan dan Timur digambarkan dalam peta 2.1.

Peta 2.1. Posisi Tanah Bumbu di Wilayah Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur (South & East Borneo).



Sumber: Diadaptasi dari peta *Insulinda to 1941*, berdasarkan *staatblad* no. 178 tahun 1898 dan peta J. Thomas Lindbland, *Between Dayak and Dutch, The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942* (Leiden: KITLV, 1988), hlm. 4.

²M. Suriansyah Ideham, *et.al.* (ed), *Sejarah Banjar* (Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003), hlm. 233. Lihat juga R.A.Leirissa *et.al.* (ed), *Sejarah Sosial Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jarahnitra, 1983/1984), hlm. 96.

Letak geografis wilayah Tanah Bumbu berada di antara 2°52' – 3°47' Lintang Selatan dan 115°15' – 116°04' Bujur Timur.³ Dari catatan J.J. Hollander tahun 1864, wilayah Tanah Bumbu memiliki luas sekitar 141,5 mil persegi dengan beberapa daerah (distrik) yakni Batulicin, Cantung, Bangkalaan, Sampanahan, Manunggal dan Cengal.⁴ Dari catatan tersebut belum memasukkan tambahan wilayah Pagatan dan Tanah Kusan dalam wilayah Tanah Bumbu karena kedua wilayah baru bergabung dalam *Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe* tahun 1898. Tanah Bumbu berbatasan dengan daerah Pasir di sebelah utara, di sebelah timur dengan Selat Makassar, berbatasan dengan Tanah Kusan di sebelah selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan daerah Banjarmasin.⁵

Menurut Schwaner, wilayah Tanah Bumbu terletak di sebelah timur Pegunungan Meratus yang melintang dari utara ke selatan Kalimantan. Pegunungan Meratus terhubung dalam satu rantai pegunungan memanjang hingga ke arah barat Banjarmasin. Dari sudut pandang geologi, perkembangan wilayah Tanah Bumbu

³ “Kabupaten Tanah Bumbu” (online) ([http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah Bumbu](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Bumbu), dikunjungi 22 Mei 2011).

⁴ J.J. Hollander, *Borneo's Zuider en Ooster Afdeling* (Handleiding bij de Beoefening der Land en Volkenkunde Van Nederlansch Oost Indie, Koninklijke Militaire Akademie, 1864), hlm.143. Wilayah Tanah Bumbu sejak tahun 2002 menjadi Kabupaten Tanah Bumbu, memiliki luas 5.066,96 km persegi (506.696 hektar) atau 13,50 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan, lihat BPS Kabupaten Tanah Bumbu, *Tanah Bumbu Dalam Angka 2009* (Batulicin: BPS Tanah Bumbu, 2009), hlm.2.

⁵ Pieter Johannes Veth, *Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indie* (Amsterdam: Van Kampen, 1869), hlm. 637.

dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama wilayah ini terbentuk dari perkembangan lapisan tanah yang terbentuk pada masa lalu di lereng timur Gunung Meratus. Kemudian periode berikutnya, daerah Tanah Bumbu dibentuk oleh endapan *aluvial* yang dihasilkan dari aktivitas laut. Hal ini membawa pengaruh besar pada perkembangan sejarah dan orang-orang yang menghuninya.⁶

Selain itu sebagian besar wilayah Tanah Bumbu berada di kelas ketinggian 25-100 meter dan di kemiringan 2-15 persen. Geologi wilayah Tanah Bumbu mempunyai ketinggian di atas 100 meter sebesar 31,01 persen dari seluruh wilayah, sehingga terdapat beberapa daerah yang merupakan dataran tinggi. Daerah dataran tinggi tersebut sebagian besar termasuk dalam jalur barisan pegunungan Meratus. Tercatat setidaknya ada 18 pegunungan yang berada di wilayah ini yang puncaknya mencapai 600 meter lebih di atas permukaan air laut. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 85 persen dan 92 persen dengan kelembaban maksimum tertinggi sebesar 99 persen. Sementara itu, kelembaban minimum terendah sebesar 55 persen.⁷

Wilayah Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Gunung Meratus memiliki sumber daya alam melimpah, yang mengandung banyak berlian yang berukuran besar. Emas juga banyak ditemukan di daerah ini. Pada wilayah pantai Tanah Bumbu

⁶ Carl Anton Ludwig Maria Schwaner, "Historische, Geograpische en Statistieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe" *Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853), hlm. 346-347, bandingkan dengan J.T. Van Gorse, "Borneo", *Bibliography of The Geology of Indonesia and Surrounding Areas*, hlm. 1-6 (online), (www.vangorselist.com, dikunjungi 20 Desember 2011).

⁷BPS Kabupaten Tanah Bumbu, *op.cit*, hlm.3.

terdapat dua teluk yakni Teluk Kelumpang dan Teluk Pamukan. Kemudian terdapat tujuh sungai besar di wilayah ini. Sungai tersebut membawa endapan pasir atau banyak lumpur yang kering pada saat air surut. Karena itu, sungai-sungai di dataran rendah diatur dan ‘diarahkan’ oleh penduduk setempat. Selain itu sungai dan anak sungai dibuatkan saluran khusus atau terusan, sehingga mudah dilalui dari segala arah. Dari sejumlah terusan tersebut, yang paling penting peranannya adalah Terusan Tanjung Batu dan Terusan Bantilan. Wilayah Tanah Bumbu pada pertengahan abad ke-19 sebagian besar ditutupi hutan lebat, hanya sebagian kecil yang dibuka oleh penduduk untuk persawahan.⁸ Adapun nama-nama gunung di wilayah Tanah Bumbu pada tahun 1866 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Nama Gunung di Wilayah Afdeeling Tanah Bumbu Tahun 1866.

No	Nama Gunung	Daerah (distrik)	Keterangan
1.	Gunung Melihat	-	-
2.	Gunung Kapari	Batulicin	-
3.	Gunung Satoi	Tanah Kusan	-
4.	Gunung Beratus	Cantung/Bangkalaan	-
5.	Gunung Sebetoeng	Pulau Laut	-
6.	Gunung Djambangan	Pulau Laut	-
7.	Gunung Soemalawi	Pulau Laut	-

Sumber: Diolah dari tulisan J.J. Hollander, *Borneo's Zuider en Ooster Afdeeling* (Handleiding Bij De Beoefening Der Land en Volkenkunde Van Nederlansch Oost Indie, Koninklijke Militaire Akademie, 1864), hlm.28-29.

⁸Pieter Johannes Veth, *loc.cit.* Beberapa *flora* (tumbuhan) di wilayah Tanah Bumbu terdata di dalam C.L. Blume, *Bijragen tot de Flora van Nederlansch Indie* (Batavia: Ter Lands Drukkerij, 1825), hlm. 1-65.

Jalur perhubungan di wilayah Tanah Bumbu selain dihubungkan lewat jalan darat dan melalui jalur sungai. Dari segi ukurannya, sungai-sungai di wilayah ini berbeda dengan sungai di wilayah Kalimantan bagian selatan dan tengah yang berukuran besar. Umumnya sungai-sungai di Tanah Bumbu dan wilayah tenggara Kalimantan lainnya, berukuran kecil. Misalnya di daerah Pasir, terdapat sungai Kendilo, kemudian di Tanah Bumbu, terdapat sungai-sungai seperti Sungai Bakeranan dan sungai lainnya di wilayah Cengal, Manunggal, Sampanahan dan Bangkalaan, Kusan, Batulicin dan Pagatan. Sungai-sungai ini mengalir di daerah perbatasan pegunungan tenggara. Arah alirannya dari barat ke arah timur, dengan pengecualian Sungai Kendilo di daerah Pasir, yang mengalir paralel dari daerah pegunungan utara dan selatan, kemudian alirannya berbelok ke arah timur dan bermuara ke Selat Makassar. Di wilayah Tanah Bumbu juga terdapat danau, seperti di daerah Kusan. Danau ini terletak sekitar dua mil dari pantai, kadang kadang dialiri sungai kecil dan menjadi air garam selama musim hujan.⁹ Adapun sungai-sungai di wilayah Tanah Bumbu yang tercatat pada tahun 1866 dapat dilihat pada tabel 2.2.

⁹ Theodore Posewitz, *Borneo: Geologi and Mineral Resources* (London: Edward Stanford, 1892), hlm. 136-137. Lihat juga catatan Residen Zuid en Oosterafdeeling van Borneo, J.G.A. Gallois, "Korte Aanteekeningen Gehouden Gedurende eene Reis langs de Oostkust van Borneo verrigt op last van het Nederlansch Indisch Gouvernement", *Bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde van Nederlandsh Indie*, Vierde deel (Amsterdam: Frederik Muller, 1856), hlm.261.

Tabel 2.2 Nama-Nama Sungai di Wilayah Tanah Bumbu Tahun 1866.

No	Nama Sungai	Daerah (distrik)	Keterangan
1.	Sungai Bakeranan	Kusan/Pagatan	-
2.	Sungai Aib	Kusan/Pagatan	-
3.	Sungai Koeboe	Kusan/Pagatan	-
4.	Sungai Magaraja	Kusan/Pagatan	-
5.	Sungai Tjantoeng	Cantung	bermuara ke Teluk Cantung
6.	Sungai Soempoeng	Samparahan	bermuara ke Teluk Sumpung
7.	Sungai Korantji	Batulicin	-
8.	Sungai Batulicin	Batulicin	bermuara ke Selat Laut
9.	Sungai Tanah Mejah	Batulicin	-
10.	Sungai Koesan/ Koekoesan	Kusan	bermuara ke Selat Laut
11.	Sungai Seratak	Pulau Laut	-
12.	Sungai Boengoer	Pulau Laut	-
13.	Sungai Sedjaka	Pulau Laut	-
14.	Sungai Semboetan	Pulau Laut	-
15.	Sungai Sekoedjang	Pulau Laut	-
16.	Sungai Siriroempoet	Pulau Laut	-
17.	Sungai Sakoembang	Pagatan	-

Sumber: Diolah dari data J.J.Hollander, *Borneo's Zuider en Ooster Afdeeling* (Handleiding Bij De Beoefening Der Land en Volkenkunde Van Nederlandsch Oost Indie, Koninklijke Militaire Akademie, 1864), hlm.28-29; Pieter Johannes Veth, *Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indie* (Amsterdam: Van Kampen, 1869), hlm.637.

Kondisi sungai-sungai di wilayah Tanah Bumbu umumnya sama dengan sungai-sungai lainnya di Kalimantan. Menurut Idwar Saleh, pada umumnya sifat-sifat sungai di Kalimantan adalah mempunyai perbedaan-perbedaan yang tinggi pada permukaan air di sepanjang alirannya, membangun gosong-gosong pasir dan banjir serta pembentukan rawa-rawa sepanjang tebing menuju ke muara. Pantainya penuh dengan rimba kayu bakau dan pohon nipah yang kemudian disambung dengan hutan-hutan yang lebat ke pedalaman yang amat sukar dimasuki. Karena letaknya pada

daerah tropis dan pada garis equator, iklimnya yang lembab dan sering turun hujan.¹⁰ Keadaan alam ini pula yang menjadikan daerah Kalimantan bagian tenggara cukup subur dan kaya sumber daya alam.¹¹

Wilayah Kalimantan bagian tenggara merupakan daerah perairan yang cukup ramai bagi pelayaran aktivitas sungai sekaligus juga pelayaran laut. Perairan pantai terdapat pada daerah Tanah Laut sampai Pulau Laut. Panjang perairan garis pantai itu dimulai dari daerah Maluka sampai ke daerah Pasir. Beberapa sungai penting bermuara di sepanjang pantai itu adalah Maluka, Kurau, Tambangan, Tobanio, berada di daerah (distrik) Tanah Laut, serta Batulicin, Pagatan, dan Pasir berada di daerah (distrik) Kotabaru.¹² Dalam perkembangannya, menjelang tahun 1900-an, orang-orang Eropa mulai meneliti dan mengeksplorasi daerah Tanah Bumbu dan sekitarnya. Seperti di daerah pegunungan Kusan, Tanah Bumbu, dan daerah Pasir, para ahli geologi pemerintah Hindia Belanda menemukan banyak bahan tambang, sehingga menyimpulkan wilayah Tanah Bumbu memiliki struktur geologi unik. Berdasarkan penelitian Von Dewall, dipaparkan bahwa pegunungan di daerah Tanah Bumbu

¹⁰M. Idwar Saleh, *Bandjarmasin, Selayang Pandang Bangkitnya Keradjaan Bandjarmasin, Posisi, Fungsi dan Artinya dalam Sedjarah Indonesia dalam Abad Ke 17* (Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru, 1960), hlm.25-26; M. Idwar Saleh, *Banjarmasih* (Banjarbaru: Museum Lambung Mangkurat, 1981/1982), hlm.7-8.

¹¹Bambang Subiyakto, "Pelayaran Sungai di Kalimantan Tenggara, Tinjauan Historis Tentang Transportasi Air Abad ke-19" (Tesis pada program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1999), hlm.10.

¹²Bambang Subiyakto, "Perompakan: Sebuah Realitas Historis Abad Ke-19 di Kal-Sel" dalam Ersis W. Abbas (ed), *Buku Kenangan Purna Tugas Prof. M.P. Lambut* (Banjarmasin: LPKPK, & DPRD kota Banjarmasin, 2003), hlm. 93.

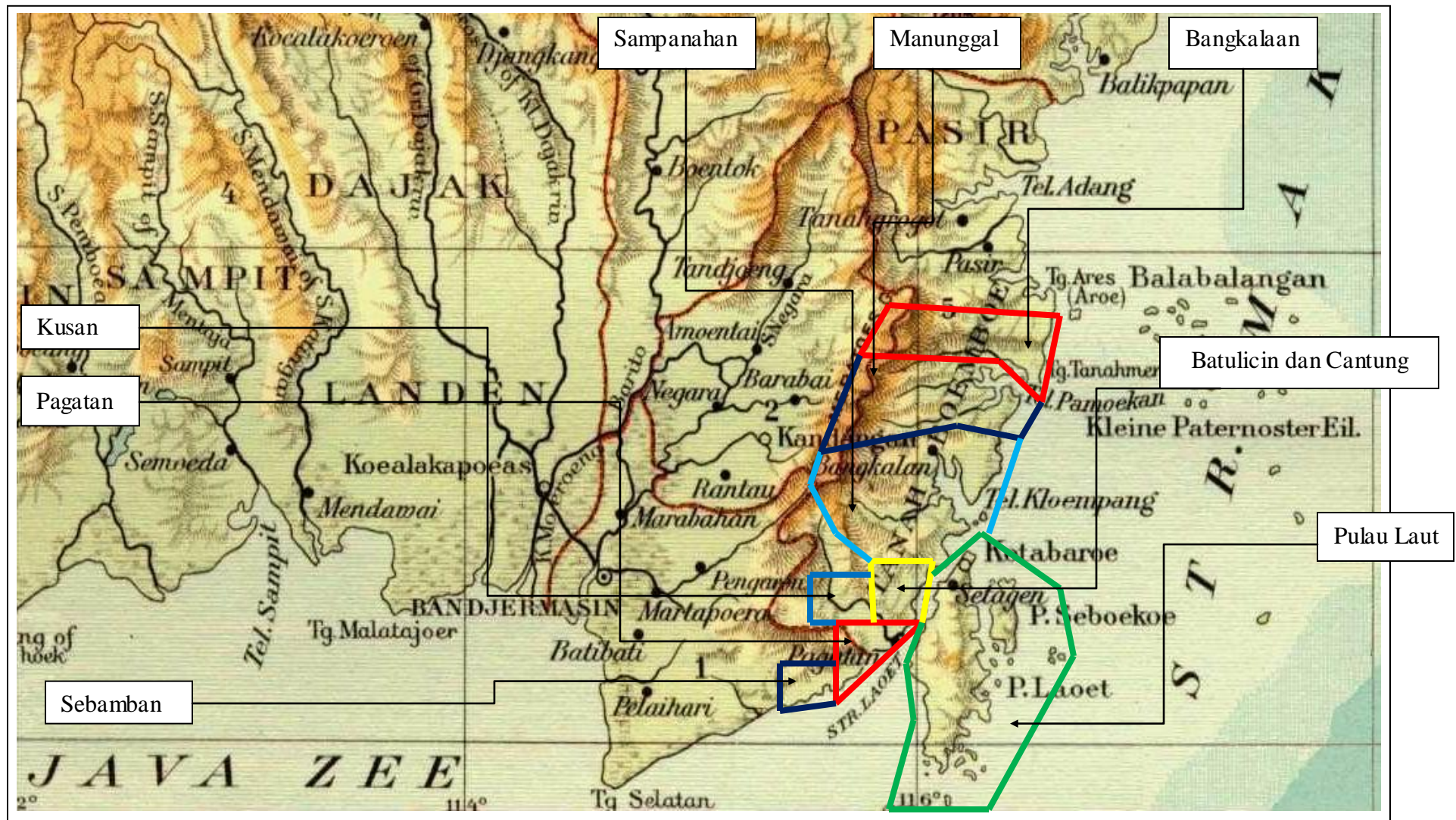
memiliki cadangan emas dan berlian dengan karakter batuan dari mineral. Pada tahun 1885 di wilayah Tanah Bumbu ditemukan batuan unik di sebuah sungai yang mengalir ke Selat Pulau Laut. Tanah tanah di sekitar sungai ini memiliki struktur kandungan berupa *serpentin*, *kuarsa*, *diorit*, dan *kuarsa-sekis*. Demikian halnya di daerah teluk Pamukan, sebelah kanan Sungai Sampanahan, Von Dewall menemukan batu kristal tua.¹³

Posisi wilayah Tanah Bumbu cukup strategis yakni terletak di pesisir, berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Jawa dan posisinya dekat dengan wilayah pulau Sulawesi. Kemudian kandungan alam-nya pun melimpah, menjadi penarik bagi orang-orang Bugis ber-*diaspora* ke daerah ini. Arus perpindahan orang-orang Bugis ke pesisir timur dan tenggara Borneo ini, menurut Jacqueline Linneton dapat dikategorikan sebagai diaspora akibat ekspansi perdagangan Bugis atau *expansion of Bugis trade*.¹⁴ Diaspora orang Bugis di wilayah Tanah Bumbu meliputi daerah daerah pesisir yang menjadi wilayah kerajaan-kerajaan kecil yakni Pagatan, Kusan, Batulicin, Cantung, Bangkalan, Sampanahan, Manunggal, Cengal, Sebamban dan Pulau Laut. Adapun letak daerah-daerah tersebut di wilayah Tanah Bumbu ditunjukkan dalam peta 2.2.

¹³Theodore Posewitz, *op.cit*, hlm. 139.

¹⁴Jacquiline Linneton dalam Andi Zaenal Abidin, *Persepsi Orang Bugis, Makasar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 61.

Peta 2.2. Letak Wilayah-wilayah dalam Landschap Tanah Bumbu di Kalimantan bagian Tenggara tahun 1874



Sumber: Diadaptasi dari peta *Borneo*, dibuat dan dipublikasikan di London oleh Stanford's Geographical Establishment tahun 1919. Peta asli memiliki skala 1 : 3.168.000, dengan ukuran asli : 59 x 39 cm.

B. Kondisi Demografis dan Ekonomi

Menurut Schwaner, penduduk Tanah Bumbu terdiri dari suku Melayu yakni Bugis dan Banjar, dan juga suku bangsa asli yakni Dayak. Umumnya pemukim bersuku bangsa Bugis dari Sulawesi Selatan (South Celebes), bermata pencaharian sebagai pedagang. Sementara itu, suku bangsa Banjar, ada yang berasal dari Banjarmasin kemudian dari daerah Pasir yang telah lama bermigrasi. Suku Melayu ini menempati wilayah pantai atau tepi sungai. Sementara Suku Dayak, adalah penduduk asli yang telah lama turun temurun bertempat tinggal di beberapa distrik di Tanah Bumbu. Penduduk asli ini telah bertahun-tahun tunduk kepada pemukim asing. Mereka jumlahnya sedikit yang tersebar di desa-desa kecil di pegunungan.¹⁵ Sementara itu dari laporan Survei Negara Hindia Belanda tahun 1853 dan 1854, wilayah Tanah Bumbu dilaporkan berpenduduk dengan kepadatan 25 orang per kilometer. Wilayah ini menghasilkan komoditas rotan dan sarang burung walet. Hasil survei ini menambahkan selain Suku Melayu, Banjar dan Bugis, terdapat juga Suku Jawa.¹⁶

Distrik-distrik di wilayah Tanah Bumbu yang cukup penting posisinya karena hasil alamnya yang melimpah. Seperti di wilayah Pagatan, Bangkalaan, Cengal, dan Manunggal. Pada tahun 1861-an kepala pemerintahan di daerah ini telah mengizinkan wilayahnya untuk usaha penggalian dan perdagangan batubara. Penduduk di wilayah Tanah Bumbu cukup beragam, seperti suku asli yang terdiri dari orang-orang Dayak,

¹⁵Carl Anton Ludwig Maria Schwaner, *op.cit*, hlm. 350.

¹⁶Lihat "Overzicht van den Staat en de Werkzaamheden Instituuts Gedurende het Jaar 1853/54", *Bijragen tot de Taal Land en Volkenkunde van Nederlansch Indie*, Derde Deel (Batavia: Van Haren, Noman en Kolf., 1855), hlm. 221-265.

kemudian pendatang yang sebagian besar orang Melayu dan Bugis, serta orang asing (orang Eropa) yang jumlahnya sedikit. Para pendatang ini bertempat tinggal pantai atau daerah sungai-sungai yang dapat dilayari hingga ke kawasan hulu sungai. Para suku pendatang ini memiliki populasi sekitar 7.500 orang pada tahun 1853. Sementara penduduk asli yakni orang Dayak umumnya hidup tergantung dari alam, hidup hanya dengan sesama suku mereka sendiri, terpisah dari orang-orang asing.¹⁷

Daerah utama yang menjadi tujuan diaspora orang-orang Bugis adalah daerah Pagatan. Perkembangan daerah ini cukup pesat. Dengan luas sekitar 3,38 mil persegi, wilayah geografisnya merupakan daerah yang kaya dan memiliki lahan-lahan terbaik untuk dibudidayakan. Menurut Schwaner, pada tahun 1853 luas wilayah geografis daerah Pagatan mencakup area seluas 3,38 mil persegi dan dihuni oleh 3.260 orang Bugis. Daerah Pagatan menurut Schwaner, semua penduduknya bersuku bangsa Bugis. Tidak terdapat orang Dayak, Banjar maupun Jawa di wilayah ini. Schwaner menggambarkan penduduk Pagatan pada pertengahan abad ke-19 cukup makmur. Walaupun penduduknya termasuk padat, tetapi hasil alam dan kesuburan daerahnya membuat penduduk di wilayah hidup berkecukupan. Di wilayah Pagatan, terdapat 15 buah kampung yang memiliki jumlah penduduk sedang.¹⁸ Adapun rincian jumlah penduduk di daerah Pagatan pada pertengahan abad 19 dapat dilihat pada tabel 2.3.

¹⁷Carl Anton Ludwig Maria Schwaner, *op.cit*, hlm 351.

¹⁸*Ibid.*

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Pagatan Tahun 1855

No	Nama kampung	Jumlah Rumah	Laki Laki	Perempuan	Anak laki Laki	Anak Perempuan	Total
1.	Sungai Dua Pumpung	10	50	15	20	12	97
2.	Sungai Dua Besar	12	22	17	20	15	73
3.	Sungai Bakau	5	22	7	10	11	50
4.	Sungai Betung	7	15	7	15	5	42
5.	Sungai Kumpa	3	10	7	6	5	28
6.	Sarang Alang	1	2	1	4	1	41
7.	Sungai Nipah	5	10	10	5	5	30
8.	Sungai Lumbu	6	10	10	7	6	33
9.	Pagatan	160	700	600	100	100	2100
10.	Tanah Danderi	10	70	30	30	25	155
11.	Madalang	10	70	30	30	25	155
12.	Paduntingan Kanan	20	10	30	25	20	155
13.	Paduntingan Kiri	20	10	30	25	20	155
14.	Saring	20	30	20	20	15	85
15.	Sungai Saring	50	70	10	10	25	175
	Jumlah		1161	853	657	593	3261

Sumber: C.A.L.M. Schwaner, “Historische, Geograpische en Statistieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe”, *Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853), hlm.355.

Dari data tersebut, daerah Kampung Pagatan memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni 2.100 orang. Sementara itu 14 kampung lainnya memiliki jumlah penduduk yang bervariasi. Ada yang berpenduduk jarang dengan jumlah hanya sekitar 20 sampai 50-an jiwa seperti Sungai Kumpa, Sungai Nipah, Sungai Lumbu, Sarang Alang, Sungai Betung dan Sungai Bakau. Sementara itu daerah lainnya ada yang berpenduduk sedang, antara 70 sampai 170-an jiwa seperti di daerah Saring, Sungai Dua Pumpung, Sungai Dua Besar, Tanah Danderi, Madalang, Paduntingan Kanan

dan Kiri serta Sungai Saring. Pagatan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar karena adanya faktor migrasi orang Bugis yang berlangsung secara kontinu hingga abad ke-20. Migrasi tersebut tidak hanya yang bermata pencaharian pedagang, juga nelayan, bahkan petani yang membuka lahan lahan pertanian di daerah Pagatan.¹⁹

Wilayah ini diperintah oleh seorang *Aroeng* (raja). Pendapatan raja adalah dari sektor perdagangan keluar daerah. Perdagangan ini cukup penting, dalam menjual produk yang dihasilkan di daerah ini. Barang tersebut berupa sarang burung putih dan hitam, lilin, rotan, damar, teripang, kura-kura, kerbau, gula, minyak, tembakau, gambir, rijat, kelapa, garam, opium, berlian dan emas. Penduduk kelas atas memperdagangkan beras, kelapa, garam, opium, berlian dan emas. Penduduk kelas bawah menjual sawit, perikanan, gula, tenun dan menggali berlian yang banyak terdapat di daerah ini.²⁰ Adapun beberapa hasil bumi di daerah Pagatan yang dijual keluar daerah serta harganya yang dicatat Schwaner pada tahun 1853 seperti digambarkan dalam tabel 2.4.

¹⁹KG. Anderson, *op.cit.*, hlm. 143. Menurut Anderson, belum ada penetapan kurun waktu yang pasti tepatnya tahun berapa orang-orang Bugis bermigrasi ke wilayah Kalimantan. Walaupun demikian diperkirakan sudah ada kelompok kelompok orang Bugis yang bermukim di sekitar pesisir timur dan tenggara Kalimantan sebelum abad ke-17.

²⁰Carl Anton Ludwig Maria Schwaner, *op.cit.*, hml. 50. Lihat catatan Residen Zuid en Oosterafdeeling van Borneo, J.G.A.Gallois, *op. cit*, hlm.223-225.

Tabel 2.4. Daftar Hasil Bumi Yang dijual Keluar daerah Pagatan, Tahun 1855.

No	Produk	Satuan	Harga
1.	Sarang Burung (putih)	Per-kati	f 2
2.	Sarang Burung (hitam)	Per-pikul	f 10
3.	Was	Per-pikul	f 5
4.	Rotan	Per-pikul	f 2,5
5.	Resin (hitam)	Per-pikul	f 1/4
6.	Resin (putih)	Per-pikul	f 1/2
7.	Trassie	Per-pikul	f 1/2
8.	Kulit Soga	Per-pikul	f 1/4
9.	Kulit Tingah	Per-100 stuks	f 1/4

Sumber: C.A.L.M. Schwaner, “Historische, Geograpische en Statistieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe”, *Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853), hlm.350.

Dari laporan Pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Timur tahun 1853, menyebutkan beberapa wilayah di luar Jawa memerlukan pasokan beras dan gula karena produksi padi tidak cukup untuk konsumsi. Pasokan negara untuk daerah di luar Jawa pada tahun 1853, hanyalah sekitar 5.000 pikul padi. Itu pun berupa tanaman “mentah” dari perladangan karena adanya banjir. Seperti di daerah Pagatan, sebuah koloni orang Bugis di Tanah Bumbu, dimana ditemukan banyak sawah. Walaupun demikian, hasilnya hanya untuk konsumsi sendiri dan belum bisa untuk memasok ke daerah lain.²¹

Pagatan menurut Pieter Johannes Veth, diperintah oleh raja (Arung) keturunan Bugis. Raja mengontrol pemerintahan melalui *Pua Adu* yang bertindak sebagai

²¹Lihat *Verslag van het Beheer en den Staat der Nederlandsche Bezettingen en Kolonien in Oost en West Indie en ter kust van Guinea over 1853* (Utrecht: Kemink en Zoon, 1853), hlm.179.

rijksbestierder atau kepala pemerintahan dengan bantuan golongan imam dan tetua kerajaan. *Arung*, imam maupun *Pua Adu* menerima pendapatan rutin. Pendapatan mereka biasanya dari para pedagang di Pagatan yang harus membayar ‘pajak perahu’ sesuai dengan jumlah muatan. Dalam hal ini, *Pua Adu* mendapatkan penghasilan utama dengan menarik ‘pajak perahu’ dalam tonase tertentu pada setiap kapal yang berdagang ke Pagatan. Pendapatan ini setengah bagian untuk *arung*, sedangkan sisanya, bagian kedua dan bagian ketiga akan diatur *Pua Adu* dan golongan imam.²² Sementara pihak *imam* mengambil 1/10 dari semua hasil panen padi, yang berjumlah sekitar 600 gantang apabila telah dipanen.²³

Selanjutnya adalah daerah Batulicin, merupakan wilayah di sebelah utara Kerajaan Pagatan dan dikelola oleh kepala pemerintahan atas nama raja dan dikontrol pemerintah Belanda. Sebenarnya daerah ini juga sangat strategis untuk perdagangan seperti daerah Pagatan, tetapi hanya dalam skala yang lebih kecil.²⁴ Perdagangan di daerah ini kurang berkembang seperti di daerah Pagatan karena minimnya jumlah penduduk. Selain itu, Batulicin tidak menjadi tujuan utama migrasi orang Bugis seperti di daerah Pagatan. Walaupun demikian, daerah ini tetap mayoritas

²²Carl Anton Ludwig Maria Schwaner, *op.cit.*, hlm.357-358; Pieter Johannes Veth, *loc.cit.*

²³*Ibid.* Lihat G.M. Bleckmann, “Iets over het Noodzakelijke en Voorkelige Eener Negerlandshe Vestiging op de Ooskust van Borneo”, dalam Jacob swart, *Verhandelingen en Berigten Betrekkelijk het Zeewegen, Zeevaartkunde, de Hydrographie, de Kolonien* (Amsterdam: G. Hulst van Keulen, 1853), hlm.351-355.

²⁴Carl Anton Ludwig Maria Schwaner, *op.cit.*, hlm.356.

berpenduduk orang Bugis keturunan yang telah menetap lama di Pagatan. Menurut laporan Jacob Swart tahun 1853, wilayah Batulicin berpenduduk sekitar 3.700 orang dengan penduduk Bugis berjumlah 300 orang dan orang Banjar sekitar 500 orang. Daerah ini diperintah oleh Pangeran Abdul Kadir.²⁵ Rincian ini berbeda dengan perhitungan Schwaner. Menurut Schwaner rincian jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah Batulicin sekitar pertengahan abad-19 dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Batulicin Pada Tahun 1855

No	Nama Kampung	Jumlah Rumah	Laki Laki	Perempuan	Anak laki Laki	Anak Perempuan	Total
1.	Batulicin	31	163	161	-	-	207
2.	Kranji	11	20	21	12	13	66
3.	Tanah Merah	15	20	22	12	11	68
	Jumlah		113	117	21	27	341

Sumber: C.A.L.M. Schwaner, "Historische, Geografische en Statistieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe", *Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853), hlm.357.

Pada pertengahan abad ke-19 ini, daerah Batulicin hanya memiliki tiga kampung. Daerah Batulicin berpenduduk sedang yakni 207 orang. Sementara kampung lainnya yakni Kampung Kranji dan Tanah Merah termasuk berpenduduk jarang karena hanya memiliki penduduk sekitar 60-an orang. Walaupun berpenduduk jarang tetapi keberadaan daerah ini juga menjadi tujuan migrasi orang Bugis di awal abad ke-20.

²⁵Lihat Jacob Swart, *Verhandelingen en Berigten Betrekkelij het Zeewezen en de Zeevarkunde*, Jaargang 1853 (Amsterdam: bij de wed G Hulst van Keulen, 1853), hlm. 352.

Posisinya yang strategis kemudian berkembang menjadi pelabuhan tradisional yang menyamai daerah Pagatan.²⁶

Daerah lain di wilayah Tanah Bumbu yang memiliki sumber daya alam melimpah adalah daerah Kusan. Menurut Veth, distrik utama di wilayah Kusan ini adalah Kusan, Selah, Selilau dan Tamuni. Pada daerah-daerah perbukitan di wilayah Selah, Selilau dan Tamuni ditemukan banyak tambang emas dan kaya akan tambang berlian. Daerah ini banyak mengandung bahan tambang emas. Selain itu, tanah di kawasan ini ditutupi hutan dari kayu ulin, rotan, damar, lilin dan madu dalam jumlah besar yang dapat diekstraksi. Gua-gua dan celah di pegunungan kapur terdapat banyak sarang burung yang dapat dikonsumsi. Perkembangan budaya di daerah ini hampir sama dengan di daerah Pagatan. Aspek perdagangan tidak signifikan dan hanya terbatas pada perdagangan skala kecil. Pada tahun 1855 daerah Pulau Laut menjadi wilayah Kusan. Kerajaan ini diperintah oleh pangeran dan sebagian besar penduduknya yang berjumlah 1.600 orang beragama Islam. Sebagian besar kebutuhan utama di Kusan, harus dibawa dari Pagatan.²⁷

²⁶Carl Anton Ludwig Maria Schwaner, *op.cit.* hlm 157. Pengaruh Bugis di Tanah Bumbu mulai ada sejak masa pemerintahan Ratu Mas (1740-1780) yang menikahi seorang pedagang dari Gowa, Sulawesi Selatan (Zuid Celebes) bernama *Daeng Malewa* yang bergelar Pangeran Dipati. Pasangan ini beranak Ratu Intan I yang menjadi raja Batulicin. Sementara dari selir Daeng Malewa berputra Pangeran Prabu dan Pangeran Layah tahun 1780. Lihat Anonim, "Ratu Mas Dari Tanah Bumbu" (tulisan tidak diterbitkan koleksi Faisal Batennie, Kotabaru, Kalimantan Selatan tt), hlm.1.

²⁷Lihat P.J Veth, "Koesan", *op.cit.*, hlm.163.

Walaupun memiliki banyak sumber daya alam, akan tetapi menurut Schwaner, daerah ini miskin. Wilayah Kusan diperintah oleh seorang Pangeran yang dibantu oleh kerabatnya.²⁸ Perkembangan penduduk daerah Kusan ini bervariasi antara kampung yang berpenduduk jarang dan sedang. Sebagai perbandingan jumlah penduduk Kusan pada pertengahan abad 19, dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kusan Tahun 1855.

No	Nama Kampung	Jumlah Rumah	Laki Laki	Perempuan	Anak laki Laki	Anak Perempuan	Total
1.	Selimoeran	4	7	7	5	6	25
2.	Setiung	3	8	10	7	7	32
3.	Lienu Truna	10	15	14	15	13	57
4.	Lassong	38	39	39	39	38	155
5.	Bedawangan (Prabukarta)	4	8	7	5	5	25
6.	Penghiangan	7	15	14	10	10	49
7.	Antasan	3	4	4	3	3	14
8.	Kuntur Bintang	25	25	20	20	20	85
9.	Tangga Bidadari	10	19	9	49	6	53
10.	Pinang Malingan	26	45	38	28	34	145
11.	Pinang Sekayu	25	25	34	43	42	144
	Jumlah		210	196	194	184	784

Sumber: C.A.L.M. Schwaner, "Historische, Geograpische en Statistieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe", *Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853), hlm.358.

Penduduk di daerah ini tidak merata. Ada yang berpenduduk agak padat tetapi di beberapa tempat malah ada yang penghuninya sangat jarang. Dalam catatan Scwaner tentang penduduk di wilayah ini, kadang-kadang masih terdapat perhitungan jumlah

²⁸*Ibid*, hlm.357.

jiwa yang sama. Padahal jika diperhitungkan secara rinci jumlah seluruh penduduk di daerah ini bisa mencapai 1570 jiwa. Dari 11 kampung di daerah Kusan yang bisa terdata hanya 784 jiwa. Hal ini diakui Scwaner sendiri karena beratnya medan dan daerah yang harus dilalui untuk mencapai daerah ini dan melakukan pendataan. Menurut laporan dari Residen Borneo (Kalimantan) bagian Selatan dan Timur tahun 1865 Gallois, Batulicin memiliki penduduk sekitar 3.700 orang, dengan pendatang sekitar 300 orang Bugis dan pada umumnya beragama Islam.²⁹

Demikian halnya dengan daerah Cantung yang juga mengalami perkembangan dan memiliki penduduk yang dapat dikatakan padat dibandingkan daerah lainnya di Tanah Bumbu. Bentuk pemerintahan di wilayah ini berbentuk kerajaan. Perdagangan sebagian besar ditangani oleh pemilik tanah. Pendapatan kerajaan ini berasal dari beberapa pajak barang yang dikenakan pada orang Dayak. Perekonomian penduduk di daerah Cantung, cukup beragam. Misalnya dalam sistem mata pencaharian orang Dayak, kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari bidang pertanian. Seperti saat usai panen padi, hasilnya berupa pasokan beras yang jumlahnya sekitar dua puluh gantang. Semua pasokan barang ini tidak dibebaskan dari pajak. Artinya, para petani pun tetap dikenakan pajak oleh penguasa lokal di daerah ini. Para pedagang pun dikenakan pajak. Pembayaran dilakukan secara tunai atau pun dalam bentuk produk oleh kapten kapal yang membawa barang-barang dari luar ke wilayah Cantung. Setiap kapal yang berangkat pun harus membayar pajak tol

²⁹*Ibid.*, lihat juga tulisan J.G.A. Gallois, *op.cit.*, hlm. 221-265. Bandingkan dengan G.M. Bleckmann, *op.cit.*, hlm.351.

sebesar f 3. Khusus untuk pajak rotan, untuk setiap seratus lembar, pajaknya f 1,50. Penduduk di daerah ini biasanya mengimpor tembakau, gambir, kain linen, garam, rempah-rempah, peluru, senjata, furnitur, besi dan opium. Bahan ekspor rotan, damar, sarang burung, lilin, tikar, dan produk lainnya. Selain itu, di daerah Cantung juga terdapat banyak wilayah yang dibuka untuk budidaya padi dan kebun.³⁰ Adapun jumlah penduduk Cantung dapat dilihat dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Cantung Tahun 1855

No	Nama Kampung	Jumlah Rumah	Laki Laki	Perempuan	Anak laki Laki	Anak Perempuan	Total
1.	Bantilan	4	10	6	4	6	26
2.	Mandoe	9	21	12	16	13	65
3.	Karang Bajau	8	26	16	15	13	70
4.	Muara Selat	12	29	19	11	17	79
5.	Buntar Laut	22	22	22	22	16	82
6.	Selat	10	10	10	22	20	62
7.	Lalabing	46	17	17	38	38	170
8.	Salapa	55	57	57	38	38	190
9.	Balintong	50	52	52	32	29	165
10.	Mandam	26	27	27	25	29	111
	Jumlah		301	268	229	219	1020

Sumber: C.A.L.M. Schwaner, "Historische, Geografische en Statistische Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe", *Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853), hlm.359.

Dari data tersebut, terdapat lima kampung di daerah Cantung yang tergolong jarang penduduknya yakni Bantilan, Mandoe, Karang Bajau, Muara Selat, Buntar Laut dan Selat. Jumlah penduduknya hanya berkisar antara 20 sampai 80-an orang. Sementara

³⁰*Ibid*, hlm.358.

daerah lain yang tergolong sedang adalah Kampung Lalabing, Salapa, Balintong dan Mandam yang penduduknya berkisar antara 100 sampai 190-an orang. Sektor perdagangan di daerah ini didominasi oleh penduduk pendatang yakni dari orang Melayu yang terdiri dari orang Banjar dan Bugis. Hal ini dimungkinkan karena sudah adanya migrasi dan hubungan perdagangan dengan pedagang dari luar daerah. Sementara itu orang Dayak, penduduk asli daerah ini pada umumnya tidak berdagang tetapi bermata pencaharian pertanian dengan lahan berpindah.³¹

Berikutnya adalah daerah Bangkalaan. Perkembangan perekonomian di wilayah ini umumnya tergantung dari bidang perdagangan. Sektor perdagangan ini dikembangkan oleh raja Bangkalaan, tetapi populasi atau pelaku perdagangan cukup rendah. Inilah yang mendorong raja melakukan monopoli perdagangan, dan menarik pajak dari pedagang yang masuk ke daerah ini. Sementara itu, untuk orang Dayak dibebaskan dari beban pajak. Jumlah penduduk Bangkalaan termasuk jarang, rinciannya dapat dilihat dalam tabel 2.8.

³¹*Ibid*, hlm.360.

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Bangkalaan Tahun 1855

No	Nama Kampung	Jumlah Rumah	Laki Laki	Perempuan	Anak laki Laki	Anak Perempuan	Total
1.	Sungai Bangkalaan	40	40	40	45	47	172
2.	Rumah Adji Pati	5	40	40	40	46	166
3.	Karangan Katatan	60	60	60	76	78	247
	Jumlah		140	140	161	171	612

Sumber: C.A.L.M. Schwaner, “Historische, Geograpische en Statistieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe”, *Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853), hlm.360.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hanya terdapat tiga kampung di wilayah Bangkalaan, yakni Sungai Bangkalaan, Rumah Adji Pati dan Karangany Katatan. Jumlah penduduk di wilayah ini hanya berkisar antara 160-240 orang. Nama kampung *Rumah Adji Pati* kemungkinan dimaksudkan Schwaner adalah lima *Balai* (biasanya disebut juga dengan sebutan rumah Dayak) yang merupakan rumah adat orang Dayak yang bisa menampung puluhan orang. Walaupun Schwaner tidak merinci berapa jumlah penduduk asli maupun pendatang, tetapi berdasarkan mata pencaharian penduduknya yang berdagang kecil kecilan, kemungkinan besar sudah terdapat pendatang Bugis di wilayah ini pada tahun 1855.³²

Kemudian, daerah lainnya di Afdeeling Tanah Bumbu adalah daerah Sampanahan. Menurut catatan J.H. Moor tahun 1780-an, daerah Sampanahan adalah daerah kerajaan kecil yang berada di wilayah barat daya Kerajaan Pasir. Rajanya

³²*Ibid.*

bergelar pangeran. Kerajaan kecil ini memiliki penduduk yang sedikit dan hidup dari perdagangan kecil-kecilan dan memproduksi tikar serta sarang burung (walet). Untuk menuju daerah ini harus menuju ke wilayah antara Pasir dan Pulau Laut dengan mengikuti pesisir wilayah Kerajaan Pasir yang jaraknya sekitar 15 mil dari Kerajaan Pasir.³³ Daerah ini tergolong miskin karena hanya sedikit tanah pertanian yang dapat dibudidayakan oleh penduduk. Jumlah penduduknya cukup jarang dan tidak sebanding dengan luasnya daerah ini. Para penguasa di wilayah ini tidak memiliki pendapatan lain, kecuali hasil sarang burung walet. Raja juga terlibat dalam perdagangan tetapi hanya dalam skala kecil. Untuk menambah pendapatan, raja mengenakan pajak tol pada hasil bumi berupa rotan yang diekspor. Pajak ini dipungut setiap keberangkatan kapal dari Sampanahan.³⁴

Menurut catatan Von Wurmb, wilayah Sampanahan adalah salah satu kerajaan yang berbatasan dengan wilayah Pulau Laut dan Banjarmasin. Mata pencaharian utama penduduk di wilayah ini adalah dalam bidang perdagangan. Penduduk asli di wilayah ini tinggal di pegunungan dan membawa hasil hutannya untuk diperdagangkan ke wilayah kerajaan Sampanahan. Daerah ini cukup

³³Lihat Dr. Leyden, "Sketch of Borneo", *Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen*, Deel VII (Batavia: Gedrukt ins Gouvernemens Drukkerij by A.H.Hubbard, 1814), hlm.18. Lihat J.H. Moor, "Borneo: Including The Late's Mr. Dalton Statements Regarding That Island", *Notices of The Indian Archipelago and Adjacent Countries* (Part First, Singapore, 1837) hlm.97.

³⁴Carl Anton Ludwig Maria Schwaner, *op.cit*, hlm.361. Lihat juga Laporan A.L Weddik (Governor of Borneo), hlm. 438; Gallois, *op.cit*. hlm.261.

berkembang karena berada tidak jauh dari wilayah pesisir.³⁵ Daerah ini hanya memiliki enam kampung yang penduduknya tidak mencapai 100 orang. Bahkan ada yang tidak terdata oleh Schwaner saat mengadakan survei penduduk di daerah ini. Jumlah penduduk Sampanahan dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Sampanahan Tahun 1855

No	Nama Kampung	Jumlah Penduduk
1.	Karangan Manik	83
2.	Banua Lawas	-
3.	Kampung Baru	-
4.	Sangi	50
5.	Ingah	-
6.	Panjanan	-
	Jumlah	133

Sumber: C.A.L.M. Schwaner, "Historische, Geograpische en Statistieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe", *Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853), hlm.361.

Catatan Schwaner tentang jumlah penduduk di daerah ini memang kurang lengkap, karena hanya dua kampung yang diperoleh data jumlah penduduknya. Sementara itu, empat kampung lainnya tidak diketahui berapa jumlahnya. Hal ini kemungkinan disebabkan beratnya medan yang harus dilalui oleh Schwaner untuk melakukan pendataan penduduk ke beberapa kampung tersebut. Dua kampung yakni Karang

³⁵Von Wurmb, "Description of the Island of Borneo with Some Account of the Manner and Customs of its Inhabitants, April 1800", dalam Alexander Tilloch *The Philosophical Magazine: Comprehending The Various Brances of Science, The Liberal and Fine Arts, Agriculture, Manufactures and Commerce* (London: J.Davis, Changery-lane, 1800), hlm.199.

Manik dan Sangi, penduduknya dapat dikategorikan jarang karena hanya memiliki jumlah penduduk tidak sampai 100 jiwa.³⁶

Selanjutnya daerah Manunggal yang diperintah oleh Punggawa Tatip, mata pencaharian masyarakatnya terutama dari bidang perdagangan dan pertanian. Penguasa lokal di daerah ini, mengenakan pajak dan biaya tol untuk para pedagang yang melewati daerah ini dari wilayah Sampanahan ke Cantung. Daerah ini memiliki sumber daya alam berupa rotan yang melimpah. Kemudian dataran tinggi di daerah ini memiliki banyak cadangan emas. Sementara tanah pertanian, hanya sedikit yang dibudidayakan penduduk.³⁷ Jumlah penduduk Manunggal terdapat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Manunggal Pada Tahun 1855

No	Nama Kampung	Jumlah Rumah	Laki Laki	Perempuan	Anak laki laki	Anak Perempuan	Total
1.	Kampung Badjan	25	25	25	25	25	157
2.	Sungai Manunggal	30	30	25	10	20	95
3.	Sela Batu	5	8	9	7	8	32
4.	Punti	3	5	5	1	5	19
5.	Woantang	6	7	5	5	5	23
6.	Sungoan	5	7	6	5	5	23
7.	Kantarang	3	5	5	4	3	17
8.	Smalawi	6	7	7	6	6	26
9.	Tengaru	3	8	3	2	3	11
	Jumlah	86					103

Sumber: C.A.L.M. Schwaner, "Historische, Geograpische en Statistieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe", *Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853), hlm.362.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, hlm.361.

Dari data pada tabel 2.10. menunjukkan bahwa kampung-kampung di wilayah Manunggal umumnya berpenduduk jarang. Kampung berpenduduk jarang tersebut adalah Sela Batu, Punt, Woantan, Sungoan, Kantarang, Smalawi dan Tengar yang memiliki jumlah penduduk berkisar dari 11 orang sampai 32 orang. Kemudian kampung yang berpenduduk sedang adalah Sungai Manunggal dan Kampung Badjan yang memiliki jumlah penduduk berkisar antara 95 sampai 150-an orang. Sementara itu untuk jumlah rumah tergolong sangat jarang yakni hanya 3-6 rumah, kecuali di Kampung Badjan dan Sungai Manunggal yang memiliki rumah yakni 25 sampai 30 rumah. Walaupun berpenduduk jarang, kemungkinan besar sudah terdapat beberapa orang migran Bugis sudah masuk ke daerah ini yang bermata pencaharian pedagang.

Wilayah lain yang masuk dalam wilayah Tanah Bumbu adalah kerajaan Cengal. Kerajaan ini berada di bawah penguasaan raja yang sama dengan kerajaan Bangkalan, yakni Adji Pati.³⁸ Tanah di daerah ini cukup yang subur, tetapi hanya sedikit yang dibudidayakan penduduk. Pendapatan adalah dari sektor pajak perdagangan yang ditarik oleh Adji Pati dari penduduk Bugis yang sudah bermukim di daerah ini. Sementara pendapatan dari pajak tol yang ditarik seperti di wilayah Cantung. Jumlah penduduk di daerah ini menurut laporan Gallois tahun 1856 sebanyak 2000 orang dengan 3000 orang Bugis. Akan tetapi Gallois, menggabungkan

³⁸Carl Anton Ludwig Maria Schwaner berpendapat Adji Pati adalah Pangeran Syarif Hasyim al-Qudsi, *Besluit dd. 24 Maret 1864 no. 15 en als no.104*; lihat juga Mr. W. Stortrenbreker, *Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde*, Deel 15 (Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Lange & co, Martinus Nijhoff, 1866), hlm. 80.

antara penduduk Manunggal, Cengal dan Bangkalan.³⁹ Dari laporan Schwaner jumlah penduduk di wilayah ini terbilang sedang dan didominasi oleh penduduk bersuku bangsa Bugis, rinciannya dapat dilihat dalam tabel 2.11.

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Cengal Pada Tahun 1855

No	Nama Kampung	Jumlah Rumah	Laki Laki	Perempuan	Anak laki Laki	Anak Perempuan	Total
1.	Cengal (Melayu)	25	52	25	12	35	151
2.	Cengal (Boeginezen)	20	20	20	20	20	327
3.	Cengal (Dayak)						
4.	Lawan	28	95	95	45	57	297
	Jumlah						773

Sumber: C.A.L.M. Schwaner, "Historische, Geografische en Statistieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe", *Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853), hlm.363.

Data dalam tabel 2.11 menunjukkan di daerah Cengal, hanya terdapat empat buah kampung. Kampung Cengal yang penduduknya orang Melayu berjumlah 151 orang. Kemudian Kampung Cengal yang berpenduduk Bugis jumlahnya 327 orang. Sementara Kampung Cengal yang berpenduduk Dayak tidak terdata oleh Schwaner. Kampung yang keempat yaitu Kampung Lawan, memiliki jumlah penduduk yang hampir sebanding dengan Kampung Cengal (Bugis). Data tersebut juga menunjukkan di daerah Cengal menjadi salah satu tujuan migrasi Bugis pada tahun 1850-an. Hal ini dibuktikan banyaknya penduduk Bugis di Kampung Cengal (Bugis). Masuknya

³⁹J.G.A. Gallois, *op.cit*, hlm. 263.

penduduk Bugis di wilayah ini kemungkinan besar juga disebabkan karena daerah ini pernah dikuasai Kerajaan Pasir pada tahun 1825 sampai tahun 1830-an. Karena itulah, dalam kurun waktu tersebut Raja-raja Cengal, Manunggul, Sampanahan diangkat Sultan Pasir.⁴⁰

Dalam perkembangannya, terjadi perubahan dan peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu tahun 1850-an sampai tahun 1930. Berdasarkan data dari *Volkstelling* atau sensus penduduk pada tahun 1930, jumlah penduduk di wilayah Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Onderafdeeling Pasir dan Tanah Bumbu 1930

No	Nama Daerah	Penduduk Pribumi	Eropa/ Keturunan	Orang Cina	Suku Lain	Total
1.	Pulau Laut	20.666	181	1.122	258	22.227
	Noord Pulau Laut	7.266	-	23	10	7.299
	Zuid Pulau Laut					
2.	Tanah Bumbu	21.352	13	317	141	22.003
	Pagatan	18.912	4	295	70	19.281
3.	Pasir					
	Boven Pasir	4.063	-	8	-	4.071
	Noord Pasir	11.054	-	7	23	11.084
	Sampanahan	9.232	22	662	54	9.970
	Zuid Pasir	15.541	40	130	80	15.791

Sumber: volkstelling 1930, Deel V, *Inveemische Bevolking van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden en de Molukken, Cencus 1930 in Netherlands Indies*, (Batavia: Departement Van Ekonomische Zaken Landsdrukkerij, 1936), hlm.126.

⁴⁰Lihat J.G. Stemler, "Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch-Indie", *Departement van Kolonien, Dutch East Indies, Dienst van den Mijnbouw* (Netherlands: Departement van Kolonien, 1888), hlm. 358 dan 366; Carl Anton Ludwig Maria Schwaner, *op.cit.*, hlm. 140.

Data pada tabel 2.12 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah Tanah Bumbu cukup besar. Bila digabung antara jumlah penduduk Pagatan (22.003 orang) dengan penduduk Cantung (19.281 orang), maka total penduduk di *afdeeling* ini adalah sekitar 41.508 orang. Jumlah ini dibagi atas penduduk pribumi, Eropa dan keturunan, Orang Cina dan suku lainnya (others). Penduduk pribumi adalah penduduk (suku) yang telah lama bertempat tinggal di wilayah tersebut yakni Dayak, Banjar, Melayu, Bugis, Jawa serta suku lainnya. Sementara suku lainnya (others) yang dimaksudkan adalah Orang Arab dan Keling (India).⁴¹

Perkembangan penduduk di wilayah Tanah Bumbu ini wajar karena menurut Djoko Suryo sekitar tahun 1900-an isu tentang peledakan penduduk, kemiskinan, lapangan pekerjaan dan perumahan serta gejala urbanisasi mulai mengemuka di Jawa, sebagaimana tercermin dalam isu tentang *Mindere Welvaart* (kemerosotan kemakmuran) yang muncul pada masa itu. Tidak hanya di Jawa, peningkatan penduduk juga terjadi di daerah-daerah lain di luar Jawa. Isu-isu itu mengundang tuntutan perbaikan kebijakan dari pihak pemerintah. Kebijakan Politik Etis dengan trilogi programnya, yaitu pendidikan, emigrasi dan irigasi, serta kebijakan perbaikan kampung atau *Kampoeng Verbeteringen*, penanggulangan kesehatan, pendirian Lumbung Desa, Bank Perkreditan Rakyat, dan lainnya yang dimulai pada dua dekade

⁴¹ Departement Van Economische Zaken Landsdrukkerij, *Volkstelling 1930, Inveemische Bevolking van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Molukken, Cencus 1930 In The Netherlands Indies* (Batavia: Departement Van Economische Zaken Landsdrukkerij, 1936), hlm.127.

pertama awal abad ke-20 merupakan solusi penting terhadap persoalan yang mengemuka pada masa itu.⁴²

Demikian halnya kondisi di luar Jawa (Kalimantan). Perkembangan kota kota di wilayah Kalimantan Tenggara, terutama di Pagatan, Kotabaru dan Batulicin mengakibatkan terjadinya peningkatan penduduk. Menurut Djoko Suryo, perkembangan kota-kota kolonial atau kota-kota *Indies* pada 1900-1940-an meningkat, sejalan dengan meningkatnya perkembangan perekonomian pada sektor-sektor tertentu, misalnya pertambangan, perkebunan, perdagangan dan perindustrian. Perkembangan kota yang terjadi pada masa itu, memiliki ciri khas yaitu menjadi basis kelahiran kaum urban baru, yang terdiri dari kaum terpelajar, birokrat atau priyayi, kaum profesional, kaum pengusaha dan pedagang dari kalangan Bumi Putra atau Pribumi, di luar kelas menengah yang berasal dari kalangan orang asing Timur, yaitu orang Cina. Pesatnya proses modernisasi, industrialisasi, komersialisasi dan edukasi yang terpusat di kota-kota besar telah menjadi faktor pendorong perubahan dan penarik arus urbanisasi dan migrasi penduduk di daerah Indonesia. Kota menjanjikan bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan atau di daerah lain di Indonesia.⁴³

⁴²Djoko Suryo, "Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta (1900-1990)", (online) (<http://sejarah.fib.ugm.ac.id>, dikunjungi 21 Maret 2011), hlm.1.

⁴³*Ibid*, hlm 2.

C. Struktur Masyarakat

Dalam struktur sosial masyarakat pendatang yakni migran Bugis, di daerah kantong komunitas Bugis yaitu di wilayah Pagatan, Kusan dan Batulicin sejak tahun 1800-an, terdapat tiga lapisan pokok. Lapisan pertama adalah *ankru* atau *anakarung* (lapisan raja beserta keluarganya; kaum bangsawan dan lapisan *an mtol* atau *ana'mattola* pada masyarakat Bugis Wajo termasuk dalam kelompok ini). Kemudian lapisan kedua, lapisan *to mredk* atau *to-maradeka* (lapisan rakyat jelata atau orang kebanyakan dan lapisan *tau deceng* pada masyarakat Bugis Wajo termasuk dalam kelompok ini). Terakhir lapisan *at* atau *ata* (budak atau hamba sahaya).⁴⁴

Hingga tahun 1930-an, tidak terjadi perubahan yang berarti dari pelapisan masyarakat Bugis yang berkembang di wilayah ini. Model stratifikasi sosial pada masyarakat Bugis di wilayah Tanah Bumbu, tidak jauh berbeda dengan yang digambarkan Friedericy dalam *Mattulada*, setidaknya terdapat dua model pelapisan sosial pada masyarakat Bugis feodal. Friedericy selanjutnya menyimpulkan bahwa pada hakekatnya masyarakat Bugis hanya terdiri dari dua lapisan pokok, yaitu lapisan *anakarung* dan *to-maradeka*. Lapisan *ata* menurut Friedericy hanya merupakan lapisan sekunder, yang muncul mengikuti pertumbuhan kehidupan di Sulawesi Selatan. Prinsip hirarki tradisional Bugis yang cukup sederhana tersebut, menurut Pelras didasarkan pada epos *La Galigo* dan mitos tentang nenek moyang orang Bugis

⁴⁴Eisenberger, *Kroniek Zuider en Oosterafdeling van Borneo* (Banjarmasin Liem Hwat Sing, 1936), hlm. 24. Lihat juga naskah "Lontara Kapitan La Mattone", hlm.1. Dalam naskah ini menyebutkan bahwa La Pangewa (raja Pagatan pertama) adalah golongan *anakarung*.

yang pada awalnya diyakini hanya terdapat dua jenis manusia, yaitu; mereka yang “berdarah putih” dari keturunan dewata; serta mereka yang “berdarah merah” yang tergolong orang biasa, rakyat jelata atau budak.⁴⁵

Pemerintah kolonial, setidaknya ikut memperkokoh sistem hierarki yang ada, dengan mengubah sistem hierarki menjadi struktur birokratis, serta membuat daftar dan silsilah bangsawan yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa yang akan bebas atau kena pajak/ kerja paksa, sekaligus sebagai patokan untuk menentukan jabatan berdasarkan status mereka. Atas pengaruh Belanda pada 1920-an, kalangan bangsawan lapisan atas bahkan mulai menambahkan gelar Andi’ Bau/Andi’ di depan nama mereka untuk membedakan diri dengan bangsawan berderajat lebih rendah.⁴⁶

Demikianlah dalam perkembangan di kawasan Tanah Bumbu pada tahun 1900-an, menurut Andi Nuralang, golongan raja disebut juga *Arung* itu adalah orang yang memerintah. Masyarakat *Arung* dikenal terdiri atas keturunan-keturunan raja atau bangsawan. Kepada mereka diberikan gelar atau sebutan-sebutan tertentu, misalnya *Andi, Petta, Baso* (pria), *Besse* (wanita), *Puang* dan lainnya. Sebutan *Andi* merupakan bagian dari nama kecil, sedangkan *Petta* merupakan bagian dari nama

⁴⁵Mattulada, “Elite di Sulawesi Selatan”, *Haperna*, I No.2, 1974), hlm. 21-34. Lihat juga H.J. Friedericy, “De standen bij de Boeginezen en Makassaren”, *Gedenkboek van de Nederlandsche deelneming aan de Internationale Koloniale, Bijdrage voor Koninklijk Instituut (BKI) 90* (Gravenhage: Martinus Nijhoff ,1933), hlm. 447-602.

⁴⁶Lihat P. Setia Lenggono, “Ponggawa dan Patronase Pertambakan di Delta Mahakam, Teori Pembentukan Ekonomi Lokal” (Disertasi pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2011), hlm. 93.

gelar yang diberikan kepada mereka yang dipandang dewasa, misalnya karena telah menikah, menduduki jabatan tertentu dalam masyarakat, atau tua karena usia. Dalam masyarakat Bugis di Tanah Bumbu misalnya terdapat nama *Andi Serang*, *Petta Tobo*, *Petta Imam*, *Andi/Besse Mommo*, dan sebagainya. Dalam perkembangannya hingga tahun 1920, juga terjadi perubahan dalam gelar ini yakni dari gelar *Arung*, berubah menjadi *Petta* atau *Andi*.⁴⁷

Stratifikasi masyarakat Bugis di tanah perantauan seperti di Kalimantan, tampaknya tidak menganut sistem yang kaku. Watak suka merantau misalnya, bisa menjadi jalan meningkatkan status. Bangsawan rendah yang memimpin sekelompok kecil pengikutnya pindah ke wilayah lain dimana tidak akan terjadi pemeriksaan silang leluhur terkadang cenderung mengaku memiliki silsilah lebih tinggi dari yang sebenarnya. Para pengikutnya pun akan mendukung sikap *patron*-nya, karena hal tersebut juga akan mengangkat derajat semua kelompok.⁴⁸ Menurut Lineton, dalam masyarakat Bugis keberhasilan ekonomi juga bisa mendongkrak derajat seseorang. Orang yang memiliki kekayaan melimpah, mengasai tanah luas, punya rumah besar dan indah, dengan mudah akan dianggap berdarah bangsawan. Demikian halnya dalam kalangan masyarakat Bugis Wajo, seperti dijelaskan Linneton, laki-laki dari

⁴⁷Andi Nuralang, *loc.cit.* *Arung* yaitu orang yang senantiasa berdiri di barisan terdepan menunjukkan orang banyak jalan kebaikan. Itulah sebabnya dalam bahasa Bugis kata *Arung* didekatkan maknanya kepada kata “jarung” atau “jarum. Dalam hal ini, jarum dalam kegiatan jahit-menjahit selalu tampil pada posisi terdepan untuk menunjuk kebaikan bagi benang. Lihat Andi Nuralang, “Kerajaan Tanah Bumbu di Kalimantan Tenggara, Eksistensinya di Masa Lalu” (Tulisan tidak diterbitkan koleksi Balai Arkeologi Banjarmasin, 2006), hlm.9.

⁴⁸*Ibid.*

keluarga kaya bahkan acapkali diizinkan mengawini perempuan berstatus lebih tinggi, setelah melalui proses *mang'elli dara* atau “membeli darah”, yaitu membeli derajat kebangsawanan, yang nilainya mahal dan ditentukan pihak perempuan.⁴⁹ Adapun lapisan, golongan dan status masyarakat Bugis Wajo, baik yang berada di Makassar maupun yang merantau ke wilayah timur dan tenggara Kalimantan menurut Setia Lenggono, ditampilkan pada tabel 2.13.

Tabel 2.13. Lapisan Masyarakat Bugis Wajo di Wilayah Kalimantan Bagian Timur dan Tenggara.

No	Lapisan	Golongan	Status
1.	Ana'Mattola	1. Ana'Mattola 2. Ana'Sangaji 3. Ana'Rajeng a. Ana'Rajeng Lebbi b. Ana'Rajeng (Biasa) 4. Ana'Cera a. Ana'Cera Sawi b. Ana'Cera Pua' c. Ana'Cera Ampulajeng d. Ana'Cera Latang Dapureng	Anak Raja bisa bergelar Arung, Datu, Puang, (Andi, Bau'/ Andi digunakan sejak 1920-an)
2.	Anakarung	Anakarung	Anak Bangsawan (Andi/ Daeng)
3.	Tau Deceng	1. Tau Deceng 2. Tau Deceng Karaja	Orang Baik (biasa) Bisa bergelar; Tau Deceng
4.	Tau Maradeka	1. Tau Maradeka Mannengnungeng 2. Tau Maradeka Sampengi	Warga Merdeka
5.	Ata	1. Ata-Mana' 2. Ata-Mabuang	Budak/ Sahaya

Sumber: Diolah dari “P. Setia Lenggono, Ponggawa dan Patronase Pertambangan di Delta Mahakam, Teori Pembentukan Ekonomi Lokal” (Disertasi Pada Program Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2011), hlm.95.

⁴⁹P. Setia Lenggono *op.cit.*, hlm. 94.

Dalam perkembangan strata sosial masyarakat Tanah Bumbu, pada pertengahan abad ke-19 umumnya tidak terdapat lagi golongan *ata* (budak/abdi) yang biasanya diperintah oleh kasta di atasnya. Umumnya mereka menjadi budak lantaran tidak mampu membayar utang, melanggar pantangan adat dan sebagainya. Oleh karena dihapuskan pemerintah Hindia Belanda sehingga golongan ini tidak ada lagi. Seiring dengan perjalanan waktu ketika sistem kerajaan runtuh dan digantikan oleh pemerintahan kolonial pada tahun 1905 di Pagatan, stratifikasi sosial masyarakat Bugis berangsur luntur. Hal ini terjadi karena desakan pemerintah kolonial untuk tidak menggunakan strata sosial tersebut. Selain itu, desakan agama Islam yang melarang klasifikasi status sosial berdasarkan kasta. Pengaruh ini terlihat jelas menjelang abad ke-20, dimana kasta terendah *ata*, mulai hilang.⁵⁰

Pada tahun 1920-an di wilayah Tanah Bumbu, pemakaian gelar *ana' karaeng*, semisal *Karaenta*, *Petta*, *Puang*, dan *Andi* masih dipakai, tetapi maknanya tidak sesakral puluhan tahun sebelumnya. Pemakaian gelar kebangsawanan tersebut tidak lagi dipandang sebagai pemilik status sosial tertinggi. Gelar lebih banyak dipakai karena alasan keturunan dan adat istiadat. Pada kelas bangsawan biasanya memiliki

⁵⁰ Lihat Andi Nuralang, *op.cit*, hlm.8. Sebagai perbandingan lihat juga Mujahidin Fahmid, "Pembentukan Elite Politik di dalam Etnis Bugis dan Makassar Menuju Hibriditas Budaya Politik" (Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2011), hlm 97-98.

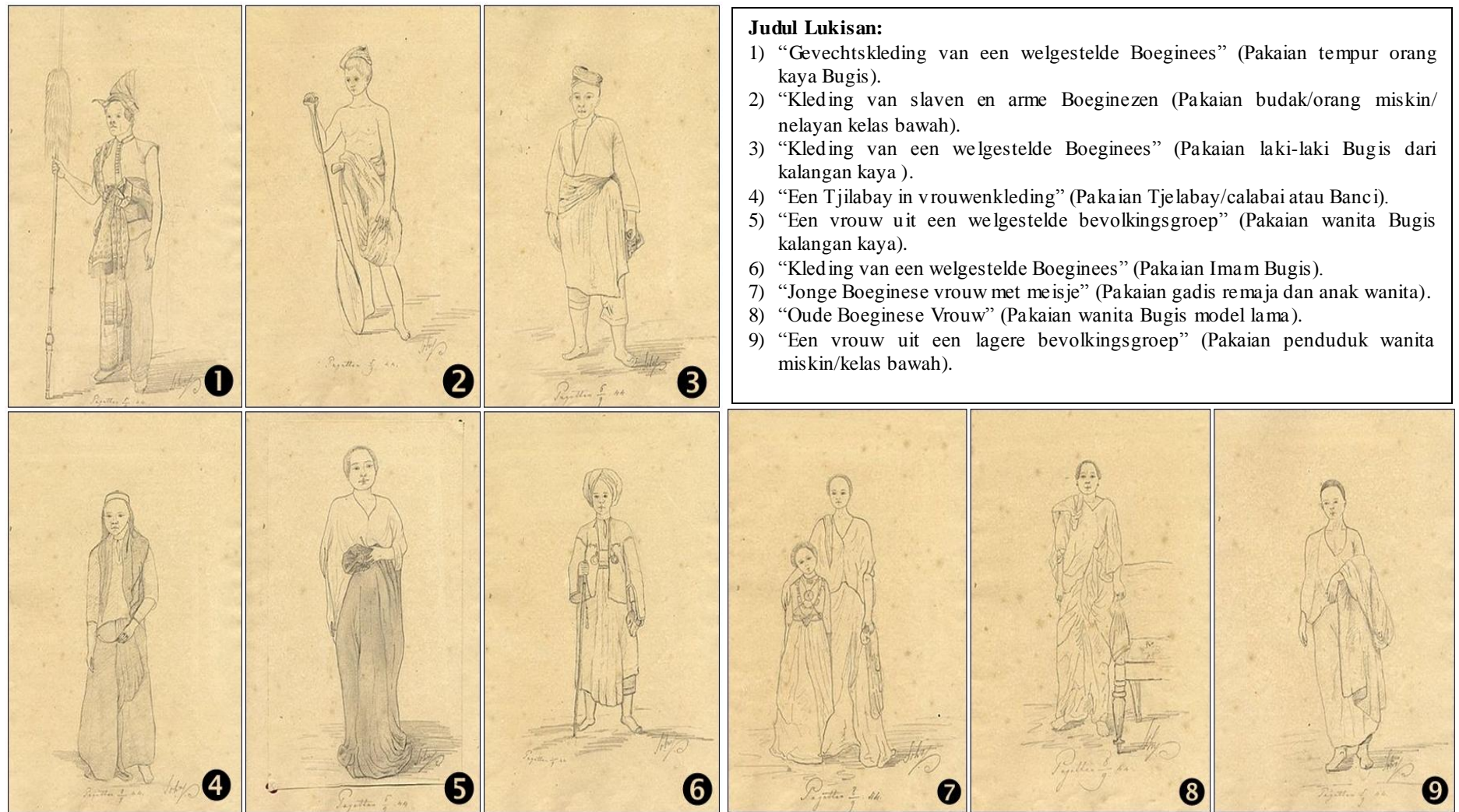
simbol-simbol kebangsawanan yang dimiliki dengan gelar ataupun perilaku yang menunjukkan kelasnya.⁵¹

Simbol-simbol kelas sosial yang ada pada masyarakat tradisional seperti pakaian dengan perhiasan mas intan permata, pakaian mahal, maupun barang lain yang menggambarkan kekayaan, menjadi penanda pemisahan strata sosial masyarakat Bugis di Tanah Bumbu pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Menurut laporan Schwaner, masyarakat Bugis di Tanah Bumbu pada tahun 1855-an memiliki pakaian dan atribut tersendiri untuk menunjukkan kelas sosialnya. Pakaian adalah salah satu cara orang Bugis melambangkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Bahasa, pakaian, jabatan, status dan lain-lain adalah simbol. Dalam sebuah simbol, ada makna tertentu yang menurut pemakainya berharga. Seperti pakaian dan atribut kehajian pada masyarakat Bugis, identitas haji yang paling menonjol. Keduanya merupakan berkah dari haji yang pertama sekali dan paling dihargai oleh orang Bugis. Karenanya, haji yang tidak memakai busana haji pada waktu pulang, maka oleh orang lain hajinya dianggap tidak memiliki berkah.⁵² Strata sosial masyarakat Bugis di wilayah Tanah Bumbu divisualkan oleh Schwaner dalam bentuk lukisan pada tahun 1844 seperti dalam gambar 2.1.

⁵¹*Ibid*, hlm.9.

⁵²Subair, "Symbolisme Haji Orang Bugis: Menguak Makna Ibadah Haji Bagi Orang Bugis di Bone, Sulawesi Selatan" (Makalah dipresentasikan dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10, Banjarmasin 1-4 November 2010), hlm. 3-4.

Gambar 2.1. Lukisan C.A.L.M. Schwaner Tentang Model Pakaian Penduduk Pagatan Berdasarkan Lapisan Sosial, Tahun 1844.



Sumber: Deskripsi lukisan, pelukis: Carl Anton Ludwig Maria Schwaner (Minister Van Kolonian, 1844) media lukisan: - dilukis tanggal 9 Mei 1844, Teknik lukis pensil (potlood). Ukuran Lukisan 19,5 x 25,5 cm. Dalam koleksi Picture of the Tropics: a Catalogue of Drawings Water Colours, Paintings, and Sculptures in the Collection of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden, by JH Maronier, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1967, hlm.69. Lukisan didownload dari (<http://kitlv.pictura-dp.nl/indeks2.php>, dikunjungi 17 Maret 2012).

Dari sumber gambar tersebut, pada gambar pertama dilukiskan pakaian tempur orang kaya Bugis di Kerajaan Pagatan. Pakaian tersebut sama seperti pakaian Bugis di Sulawesi Selatan pada umumnya. Setelan celana panjang dan baju tanpa lengan, dilengkapi lilitan kain di pinggang. Hal yang tampak berbeda adalah senjata di pinggang lukisan prajurit tersebut, bukanlah *badik* (senjata khas Bugis yang memiliki gagang melengkung), tetapi keris yang merupakan senjata khas seperti raja raja Banjar. Kemudian di kepala prajurit melilit *sigara*' (penutup kepala khas Bugis) atau dinamakan *laung* dalam Bahasa Banjar.

Kemudian pada gambar kedua dilukiskan pakaian golongan budak atau orang miskin, yang pada gambar dari kalangan nelayan. Pakaianya hanya kain sarung biasa tanpa pakaian (baju), seperti kalangan lainnya. Berbeda dengan gambar keempat yakni pakaian golongan kaya (laki laki) yang memakai pakaian lengkap dengan baju panjang dan celana panjang. Baju inilah yang biasanya dipakai golongan *puang* atau terhormat dalam masyarakat Bugis.

Kemudian pada gambar yang kelima adalah pakaian golongan *tjelabay*.⁵³ Sebenarnya yang dimaksud dengan *tjelabay* oleh pelukis tersebut adalah *Calabai* yang berperan sebagai *bissu*, pendeta banci yang bertugas memimpin upacara ritual. Keberadaan *bissu* di Kerajaan Pagatan, menurut K.G. Anderson pada masa pemerintahan Ratu Sengngeng Daeng Mangkau (1875-1883). *Bissu* dijadikan sebagai

⁵³Nama *bissu* pertama terdapat dalam naskah La Galigo yang menyebutkan adanya saudara kembar emas Sawerigading yang bernama We Tenri Abeng Bissu Rilangi. Lihat H. Hary Sumange dan M.E. Fachry, "Menelusuri Keberadaan Bissu (Calabai) di Kabupaten Soppeng" (Makalah dipresentasikan pada Festival Galigo dan Seminar Internasional Sawerigading Mamasa, 10-14 Desember 2003), hlm.10.

tempat untuk ‘konsultasi’ mencari pasangan hidup, meminta saran dan pendapat. Para bissu menandakan bahwa di Kerajaan Pagatan walaupun sudah beragama Islam tetapi masih menganut kepercayaan Bugis tradisional.⁵⁴

Menurut Sharyn Graham, seorang Bissu tidak dapat dianggap sebagai banci atau waria, karena mereka tidak memakai pakaian dari golongan gender apa pun namun setelan tertentu dan tersendiri untuk golongan mereka. Dalam kepercayaan tradisional Bugis, tidak terdapat hanya dua jenis kelamin seperti yang dikenal, tetapi empat (atau lima bila golongan *bissu* juga dihitung), yaitu *aoroaen* (Oroane) atau laki-laki, *mkurai* (Makunrai) atau perempuan, *cllai* (Calalai) atau perempuan yang berpenampilan seperti layaknya laki-laki dan *clbai* (Calabai) atau laki-laki yang berpenampilan seperti layaknya perempuan.⁵⁵

Kemudian pada gambar keenam adalah pakaian dari kalangan orang kaya Bugis (Perempuan) yang mengenakan baju panjang dan kain panjang sutra Bugis yang

⁵⁴ Istilah *Bissu* mempunyai persamaan dengan istilah *Biksyu* dalam agama Budha. Ini membuktikan adanya pengaruh agama Budha yang kurang mendalam di Sulawesi Selatan. Penampilan Bissu itu mirip banci. Penampilan fisik seperti itu dimaksudkan agar mereka dapat melepaskan diri dari tuntutan biologi terhadap lawan jenisnya. Dengan demikian, hubungan Bissu dengan para dewa tidak pernah putus. Pendapat yang sama dikemukakan Hooykaas, selain berperanan para bissu zaman dahulu juga sebagai pendeta agama juga berupaya menjaga puteri-puteri raja, khususnya ketika mereka sedang mandi atau mengganti pakaian. Umumnya Bissu adalah laki-laki; namun terdapat juga wanita tetapi bilangannya sedikit. Bissu mempunyai bahasa mereka sendiri untuk berkomunikasi sesama mereka, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Lihat “Nurhayati Rahman, Agama, Tradisi dan Kesenian dalam Manuskrip La Galigo”, *sari* volume 26 tahun 2008, hlm. 216-217.

⁵⁵ Lihat Sharyn Graham, “Sex, Gender, and Priests in South Sulawesi, Indonesia”, *International Institute for Asian Studies (IIAS) Newsletter*, 27 November 2002, hlm. 29.

mahal. Pakaian ini menunjukkan kelasnya dalam masyarakat Bugis. Berbeda dengan gambar ketujuh yakni pakaian *Imam Pagattan* (Pua Imam) yang mengenakan baju panjang dan kain panjang. Pada bagian kepala Pua Imam Pagatan memakai *Surubeng*, yaitu sorban yang dipakai untuk menutupi kepala. Dalam gambar juga tampak bahwa pakaian *surubeng* dilengkapi dengan *tippolo*, sejenis aksesoris kepala yang dihiasi dengan tali yang terjumbai.⁵⁶ Sementara itu, pada gambar kedelapan adalah pakaian wanita model lama. Walaupun model lama, tetapi tetap menunjukkan bahwa pakaian ini pakaian dari kalangan berada. Pada gambar terakhir yakni gambar kesembilan adalah pakaian gadis remaja/wanita muda dari kalangan kaya atau berada. Tidak jauh berbeda dengan pakaian wanita Bugis dari kalangan bangsawan pada umumnya yaitu baju panjang dengan kain panjang.

Selain pembagian strata masyarakat, terdapat beberapa pola tingkah laku orang Bugis yang tercermin dalam realita kehidupan yang erat hubungannya dengan unsur budaya dalam menjalin interaksi sosial-nya. Dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis di wilayah Tanah Bumbu, dikenal istilah falsapah *siri* (*siri'*) yang merupakan bagian dari *pGeder* (*penganderreng*). Konon dalam masyarakat Bugis peristiwa bunuh membunuh dengan *Jallo* (*hamuk*) sering terjadi dengan latar belakang *siri'*. Secara lahir sering tampak seolah-olah orang Bugis itu merasa *siri'*,

⁵⁶Sebenarnya sorban tidak hanya dipakai oleh haji saja karena semua orang yang dianggap sebagai pemuka agama juga sering memakainya. *Tippolo* ini merupakan adaptasi dari pakaian orang Arab. Cara pemakaiannya adalah setelah memakai *surubeng*. Fungsinya sebagai pengikat *surubeng* agar tidak mudah jatuh atau terbang oleh angin. Subair, *op.cit.*, hlm.5.

sehingga rela membunuh atau terbunuh kerana alasan yang sepele, atau karena pelanggaran adat perkawinan. Pada hakekatnya alasan yang sepele yang menimbulkan rasa *siri'*, merupakan salah satu alasan lahir yang menjadikan seorang Bugis kehilangan martabat dan rasa harga diri dan demikian juga identitas sosialnya.⁵⁷

Ada tiga pengertian konsep *siri'* dalam masyarakat Bugis yakni malu, daya pendorong untuk membinasakan siapa saja yang telah menyinggung harga diri secara tak berprikemanusiaan terhadap diri seseorang, atau dengan daya pendorong untuk bekerja atau berusaha sebanyak mungkin. Selain itu *siri'* adalah perasaan malu yang memberi kewajiban moral untuk membunuh pihak pelanggar adat, terutama dalam soal-soal hubungan perkawinan. Dalam kesusastraan *pes* (*paseng*) yang memuat amanat-amanat dari nenek moyang, ada contoh-contoh dari ungkapan yang diberikan kepada konsep *siri'*, seperti *sirimi riaoroa rilino* (*Siri'mi rionroang ri lino*) artinya hanya untuk *siri'* itu sajalah seseorang Bugis tinggal di dunia. Dalam ungkapan ini, arti *siri'* sebagai hal yang memberikan identitas sosial dan martabat seorang Bugis. Hanya kalau ada martabat itulah maka hidup itu ada artinya.⁵⁸

⁵⁷P. Setia Lenggono *op.cit.*, hlm. 96. Tidak ada sumber sumber setempat yang menjelaskan tentang adat istiadat secara khusus di wilayah Tanah Bumbu pada umumnya dan Pagatan pada khususnya. Tetapi, sebagai perbandingan adat istiadat dan sistem pemerintahan Orang Bugis Wajo di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu yang sama yakni abad 18 dan 19, lihat James Brooke & George Rodney Mundy, *Narrative of Events in Borneo and Celebes, Down to the Occupation of Labuan*, vol. I (London: John Murray, Albemarle Street, 1848), hlm.60-90.

⁵⁸*Ibid*, hlm 97.

Kemudian istilah *met sirin* (*mate ri siri'na*) artinya mati dalam *siri'*, atau mati untuk menegakan martabat diri yang dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat. Berikutnya, istilah *mate siri'* artinya mati *siri'*, atau orang yang sudah hilang martabat diri, adalah seperti bangkai hidup. Demikian orang Bugis yang *mate siri'* akan melakukan *jallo* atau Amuk sampai ia mati sendiri. *Jallo'* yang demikian itu disebut *nappaentengi siri'na*, artinya ditegakkannya kembali martabat dirinya. Kalau ia mati dalam *jallo'*nya itu, maka ia sebut *worowen to eak sirin* (*worowane to engka siri'na*), artinya jantan yang ada martabat dirinya. *Siri'* merupakan pola tingkah laku orang Bugis yang tercermin dalam realita kehidupan dan merupakan suatu perwujudan tingkah laku yang berkaitan erat dengan unsur budaya di dalam menjalin interaksi sosial.⁵⁹

D. Struktur Pemerintahan Sipil

Tanah Bumbu adalah nama kerajaan yang dibentuk tahun 1660 yang berdaulat dibawah Kerajaan Banjar. Selanjutnya 4 Mei 1826, Sultan Banjar yang berkuasa, Sultan Adam al-Watsiq Billah, menyerahkan wilayah tenggara dan timur Kalimantan beserta daerah lainnya kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sejak itulah Tanah Bumbu menjadi wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Dari catatan Schwaner, pada tahun 1844, Tanah Bumbu menjadi wilayah *onderafdeeling van Tanah Boemboe* dengan beberapa distrik yaitu Pagatan, Kusan, Batulicin, Cantung dengan

⁵⁹*Ibid*, hlm.98.

Buntar Laut, Bangkalan, Sampanahan, Manunggul dan Cengal. Pada waktu itu distrik Pulau Laut belum dibentuk. Terjadi perubahan pada tahun 1845, distrik Pulau Laut dan Batulicin tergabung menjadi satu distrik yaitu Tanah Kusan.⁶⁰

Pada tahun 1848, Gubernur Jenderal Rochussen yang berkuasa di Kalimantan, membagi wilayah Kalimantan di bawah otoritas Belanda, ke dalam dua Karesidenan, yaitu *Westerafdeling Van Borneo* dan *Zuid-en Oosterafdeling Van Borneo*. Wilayah Tanah Bumbu menjadi salah satu wilayah *onderafdeeling* yang dikenal dengan nama *onderafdeeling van Tanah Boemboe* pada tahun 1849 yang diatur dalam *Staatsblad* tahun 1849 no.8. Dalam *Staatsblad* ini, wilayah Tanah Bumbu dan daerah Kotawaringin, Sampit, Pembuang, Mendawai, Tanah Laut, Dusun Iilir, Pasir, Kutai, Berau termasuk dalam wilayah Karesidenan *Borneo Zuid Ooster Afdeeling* (Karesidenan Borneo bagian Tenggara) yang beribukota di Banjarmasin.⁶¹ Pada tahun

⁶⁰Carl Anton Ludwig Maria Schwaner, *op.cit*, hlm. 357. Sebelum perjanjian tahun 1826 sudah ada perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan Banjar yaitu *Alteratie en ampliate Op Het Contract Met Den Sulthan Van Bandjarmasin, Van 1 Januarij 1817-13 september 1823*, pasal 5 menyatakan bahwa daerah Tatas, Kuin, Seluruh daerah Dayak; Mandawai, Sampit, dan Kotawaringin, dengan semua bagiannya; berikut daerah Sintang, Lawai, dan Jelai, Bakumpai, Tabanio, Pagatan, Pulau Laut, Pasir, Kutai, Berau dan seluruh bagian-bagiannya diserahkan pihak Banjarmasin kepada Pemerintahan Hindia Belanda. Lihat ANRI, “Alteratie en ampliate Op Het Contract Met Den Sulthan Van Bandjarmasin, Van 1 Januarij 1817-13 September 1823”, *Arsip Surat-Surat Perjanjian Antara Kesultanan Banjarmasin Dengan Pemerintahan VOC, Bataafshe Republik, Inggris dan Hindia Belanda 1635 – 1860* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1965), hlm. 214.

⁶¹Mengenai pengaturan wilayah di afdeeling Borneo Tenggara tahun 1849, lihat *Staatsblad van Nederlandisch Indie Voor Het Jaar 1849, op.cit.*, hlm. 1-2.

1853 terbentuk lanskap Sebamban yang kemudian digabungkan dalam *onderafdeeling van Tanah Boemboe*.⁶²

Pada tahun 1898, terjadi perubahan pembagian wilayah lokal administratif kembali, seperti yang terdapat dalam *staatblad* no. 178 tahun 1898. Dalam *staatblad* ini, wilayah Tanah Bumbu menjadi salah satu *afdeeling* yang tergabung dalam *Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe*, dalam wilayah *Residentie Borneo's Zuid en Oosterafdeeling* (Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur).⁶³ Selain *Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe*, yang tergabung dalam Karesidenan Borneo Selatan dan Timur adalah *Afdeeling Bandjermasin en Ommelanden*, Martapura, Kandangan, Amuntai, *Doesoer Landen* (Tanah-Tanah Dusun), *Dajak Landen* (Tanah Tanah Dajak) dan Sampit. Masing masing daerah ini pun terbagi dalam *onderafdeeling* dan distrik distrik.⁶⁴

Dengan demikian terjadi perkembangan dan perubahan dalam struktur dan birokrasi pemerintahan di Tanah Bumbu sejak tahun 1849 sampai 1898. Seperti sistem pemerintahan di daerah Pagatan pada tahun 1848, masih memakai birokrasi kerajaan.⁶⁵ Sistem pemerintahan sama seperti sistem pemerintahan kerajaan di daerah

⁶² P.J. Veth, *op.cit*, hlm. 176.

⁶³ M. Idwar Saleh *et al*, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin; Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/1979), hlm.22.

⁶⁴ *Ibid*, lihat juga M. Idwar Saleh, *et.al.*, *Sejarah Daerah Tematis, Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat, 1977/1978), hlm. 9.

Sulawesi Selatan umumnya, terutama di Wajo hal ini karena adanya pengaruh migrasi orang Bugis ke Kalimantan bagian tenggara sejak tahun 1735. Sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi adalah raja, tetapi tidak bergelar *Sultan* atau *Panembahan*, tetapi bergelar *Arung* atau *Aroeng* (sebutan pemerintah Hindia Belanda). Gelar ini umumnya dipakai oleh raja-raja Wajo di Sulawesi Selatan bagian utara. Pemakaian gelar *Arung* di Kerajaan Pagatan, berlangsung secara turun temurun sejak raja Pagatan kedua, Arung Pallewange yang memerintah tahun 1838 hingga raja Pagatan terakhir, Arung Abdul Rahim Andi Sallo yang menyerahkan Kerajaan Pagatan pada pemerintah Hindia Belanda tahun 1908.⁶⁶

Dalam sistem pemerintahan masyarakat Bugis Pagatan, yang berkuasa penuh adalah *Arung* dengan lingkup *Anakarung*, yaitu raja dengan lingkungan kerabat keluarga bangsawan, menduduki jabatan-jabatan kepemimpinan pemerintahan, baik di pusat kerajaan maupun di daerah-daerah bawahannya. Dalam menjalankan pemerintahannya, seorang *Arung* Pagatan tak boleh terlepas filosofi empat kualitas utama manusia Bugis yang disebut dalam *Lontara* sebagai *sulp eap* (*sulapa eppa*)

⁶⁶Lihat naskah “Lontara Kapitan La Mattone”, hlm.1-2; C.E. van Kesteren, R.A. van Sandick & J.E. de Meyier, berpendapat gelar *Arung* hanya diperuntukkan untuk raja Bugis, kedudukannya sama dengan gelar *karaeng* pada suku Makassar, lihat C.E. van Kesteren, R.A. van Sandick & J.E. de Meyier, *De Indische Gids*, Volume 5, Staat en Letterkundig Maandschrift (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1863) hlm.181. Kesetaraan kedudukan *Arung* dan *Karaeng* juga terdapat dalam “Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië”, *Koloniaal Tijdschrift*, Volume 17 (1928), hlm. 327. Tammo Jacob Bezemer menambahkan gelar *Arung* yang dipergunakan untuk menunjukkan raja atau bangsawan Bugis, posisinya sama dengan pemakaian gelar *Datoe* dan *Petta Mangkaoe*, lihat Tammo Jacob Bezemer, *Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië* (Amsterdam: EJ Brill, 1921), hlm.71.

atau segi empat. Keempat kualitas atau sifat tersebut merupakan modal yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Selain sifat *prit*(*panrita*) atau saleh, tiga sifat yang dimaksud adalah *wrni* (*warani*) atau berani, kemudian *mc* (*macca*) atau cerdas dan *sugi* (*sugi*) atau kaya.⁶⁷

Selanjutnya adalah golongan elit kedua yakni *Pua Adu* yang mengontrol jalannya pemerintahan. Golongan ini disetarakan dengan *anakarung* (bangsawan).⁶⁸ Pemangku jabatan *Pua Adu* harus memiliki sifat *to panrita*. Sifat ini dalam arti, kualitas dan kapasitas utama *to-panrita* dapat disimpulkan dari *paseng* (petuah) para pendahulu, seperti istilah *aj nslaiko ac sibw elpu* (*Aja' nasalaiko acca sibawa lempu*) artinya milikilah kecerdasan dan kejujuran kapan saja. Dalam perspektif masyarakat Bugis, integrasi kecerdasan dan kejujuran merupakan kualifikasi penting setiap calon pemimpin. Posisi *Pua Adu* sangat strategis, karena turut berperan serta mengatur pemerintahan. Kemudian sebagai pelaksana kebijakan para penguasa dan menjaga agar tidak ada kebijakan sewenang-wenang terhadap rakyat demi terciptanya keadilan, keamanan dan kemakmuran dalam wilayah kerajaan atau *akkarungeng*.⁶⁹

Dalam menjalankan roda pemerintahan, antara *Pua adu* dan *Arung* tercipta semacam harmoni dan sinergi antar penguasa. Sebagai perbandingan seperti dalam

⁶⁷ Lihat Wahyuddin Halim, “Arung, To-panrita dan Transformasi, Otoritas Keagamaan dan Kecendekiawanan di Sulsel” (Draft makalah pada Diskusi Buku Christian Pelras, *Manusia Bugis*, di Universitas Hasanuddin, Makassar 14-16 Maret 2006), hlm.1.

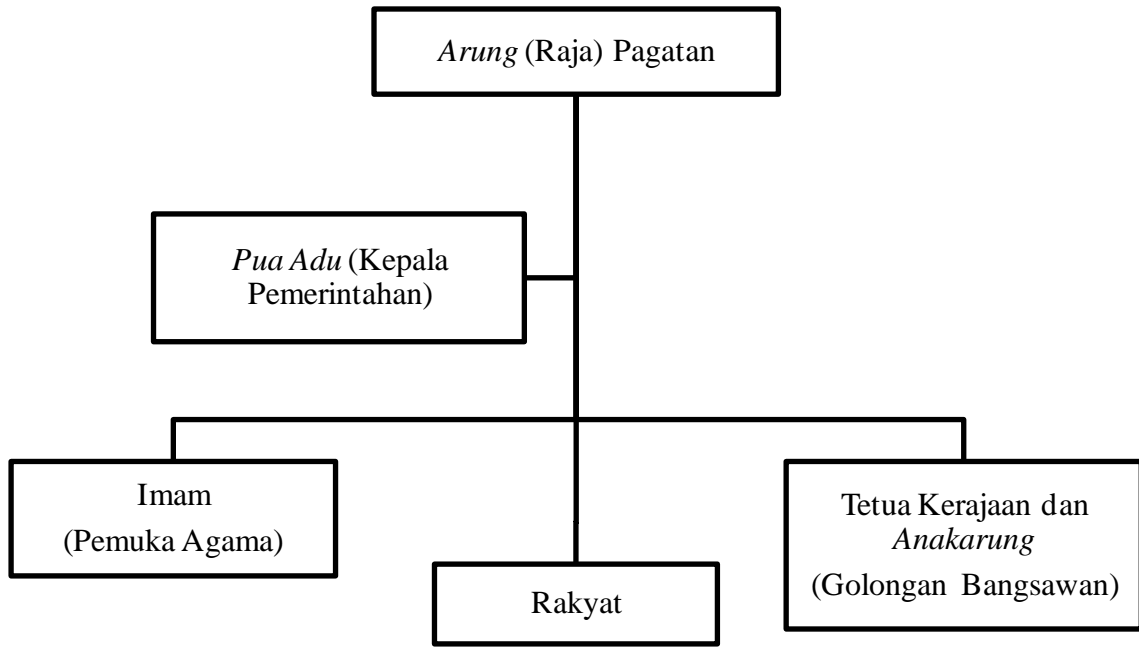
⁶⁸J.G.A. Gallois, *op.cit*, hlm. 261.

⁶⁹ Abdul Rahim & Anwar Ibrahim, *Nilai Demokrasi Dalam Budaya Bugis Makassar* (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004), hlm. 14-19.

tulisan A. Z. Abidin, salah satu faktor penting yang membawa Wajo mencapai *the golden age*-nya pada abad ke-18 dan ke-19, adalah karena ada sinergi antara raja dan para cendekiawan atau *to-panrita* sehingga terdapat semboyan atau salah satu *aed amredkeG to wjoea* (*ade' ammaradèkangenna to Wajo'è*), yaitu *mredk to wjoeaE njjia aeln mredk tneami at naia tomek tnea mredk men aed asmturuesni npopua* (*Maradèka to Wajo'è, najajiang alèna maradèka, tanaèmi ata, naia to makkètanaè maradèka maneng, ade' assamaturusenami napopuang*) yang artinya Orang Wajo itu merdeka dan dilahirkan merdeka. Hanya tanah yang menjadi budak sementara manusia yang hidup di atasnya adalah merdeka. Hanya adat permufakatan atau konsensus mereka yang dipatuhi. Prinsip ini juga berarti orang-orang Wajo itu tidak terikat oleh perintah seorang raja (*Arung Matoa*) jika perintah itu bertentangan dengan *aed asmturuesni to wjoeaE* (*ade' assamaturusenna to Wajo'è*) atau konsensus orang-orang Wajo. Bahkan dalam ungkapan lain, yang juga diasosiasikan dengan salah salah seorang tokoh cendekiawan di Wajo pada abad ke-18 yakni Puang Ri Maggalatung, disebutkan *ri lel tpu mupi nmredk to wjoea* (*ri laleng tampu' mupi namaradèka to Wajo'è.*) atau bahkan semenjak masih dalam kandungan, orang-orang Wajo sudah merdeka.⁷⁰ Setelah elit *Pua Adu* terdapat golongan *imam*. Kemudian golongan *anakarung* dan tetua kerajaan. Adapun struktur pemerintahan di kerajaan Pagatan secara hierarkhis tahun 1848-1908 ditampilkan dalam gambar skema 2.2. berikut.

⁷⁰*Ibid*, hlm.15.

Gambar 2. 2. Struktur Pemerintahan di wilayah Pagatan dan Kusan 1861-1908.



Sumber: Diolah dari C.A.L.M. Schwaner, "Historische, Geograpische en Statitieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe", *Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853).

Dalam perkembangannya, tahun 1898 daerah daerah di wilayah Tanah Bumbu menjadi daerah *leenplichtige landschappen* dalam wilayah *Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe*. Menurut *Staatblaad* tahun 1898 no. 178, wilayah *Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe*, dengan ibukota Kotabaru, terdiri dari daerah-daerah *leenplichtige landschappen* atau daerah *landschap* yang langsung diperintah kepala bumiputeranya

yakni daerah Pasir, Pagatan, Kusan, Cengal, Manunggal, Bangkalaan, Sampanahan, Cantung, Batulicin, Sebamban, Pulau Laut dan Pulau Sebuku.⁷¹

Walaupun memiliki penduduk orang Bugis, tetapi struktur pemerintahan di kerajaan kerajaan kecil lainnya di wilayah Tanah Bumbu seperti Batulicin, Cantung, Bangkalaan, Sampanahan, Manunggal dan Cengal berbeda dengan di Pagatan. Hal ini karena kedudukan kerajaan-kerajaan tersebut secara politik berdaulat dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar, sebelum diserahkan ke Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Hanya karena pelayanan pemerintahan tidak terjangkau oleh pelayanan kesultanan maka ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil tersebut diberikan wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri dalam kelompok komunitasnya, kemudian juga ada yang dengan sengaja berdiri karena adanya latar belakang perebutan kekuasaan dari Kesultanan Banjar sendiri.⁷²

Pada umumnya, struktur pemerintahan di wilayah lain di Tanah Bumbu yakni Kerajaan Batulicin, Cantung, Bangkalaan, Sampanahan, Manunggal dan Cengal, sebenarnya sama secara hierarki dengan sistem pemerintahan tidak jauh berbeda dengan struktur pemerintahan di wilayah Pagatan. Hanya berbeda dari gelar elit yang menempati posisi puncak, seperti Sultan atau Pangeran yang bergelar *Aji*, yang berfungsi sebagai kepala negara. Di bawah *Pangeran* atau *Aji*, bukan *Pua Adu* seperti

⁷¹Lihat Alex A Koroh, *Lintasan Sejarah Pemerintahan Daerah di Kalimantan Selatan 1901-1957* (Banjarbaru: Scripta Cendekia, 2009), hlm. 4-6.

⁷²ANRI, C. Nagtegaal, (Controleur), “Aanvullende Memorie van Overgave (MvO) van de Onderafdeling Poeloe Laoet en Tanah Boemboe, 1938”, koleksi MvO Serie DL. hlm. 4.

di wilayah Pagatan tetapi bergelar *mangkubumi* yang berfungsi sebagai pemimpin organisasi pemerintahan.⁷³

Kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Tanah Bumbu, umumnya dapat dikategorikan sebagai kerajaan maritim. Dalam kerajaan maritim ini lebih menitikberatkan pada perannya sebagai kerajaan dagang. Karena itu dalam struktur kerajaan ini, di samping keturunan, kekayaan pun merupakan faktor yang menentukan juga dalam kedudukan raja. Raja di tengah golongan bangsawan harus mempunyai kekayaan yang cukup apabila ingin terjamin kekuasaannya. Setelah raja, menurut Noorlander terdapat Dewan Mahkota maupun Putera Mahkota dalam kerajaan, yang nantinya akan menggantikan raja.⁷⁴

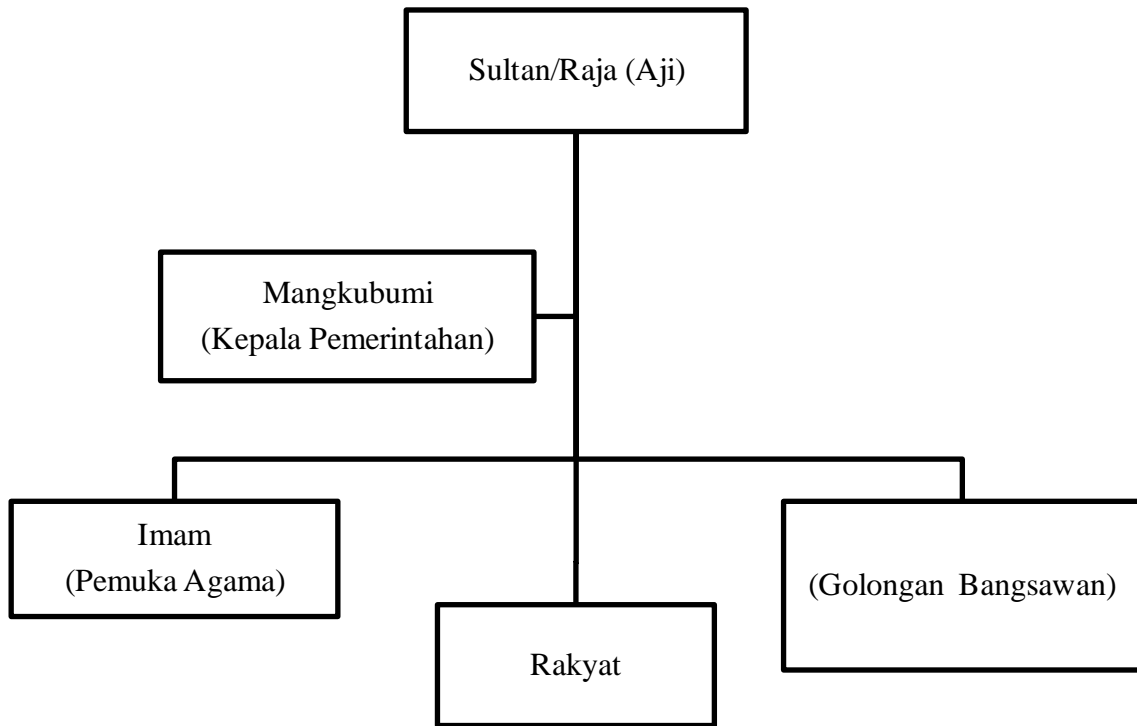
Jabatan *Mangkubumi* menurut M.Z.Arifin Anis, pada awalnya tidak dijabat oleh keluarga Sultan, tetapi pada perkembangan berikutnya jabatan itu harus dijabat oleh pejabat yang berasal dari keluarga dekat istana, dan jabatan-jabatan yang berada di pusat kota selalu diduduki oleh pejabat istana, sehingga bentuk birokrasi yang berlaku dikenal sebagai birokrasi *patrimonial*.⁷⁵ Adapun susunan birokrasi di wilayah kerajaan Batulicin, Cantung, Bangkalan, Sampanahan, Manunggal dan Cengal, hingga awal abad 20 ditampilkan dalam gambar 2.3.

⁷³*Ibid*, hlm. 42.

⁷⁴M.Z. Arifin Anis, "Mobilitas Elit di Kerajaan Banjarmasin Pada Paruh Kedua Abad Ke-16" (Laporan Penelitian FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1997), hlm. 3.

⁷⁵*Ibid*.

Gambar 2.3. Struktur Pemerintahan di Batulicin, Cantung, Bangkalaan, Sampanahan, Manunggal, Cengal, Pulau Laut dan Sebamban 1861-1903.



Sumber: Diolah dari C.A.L.M. Schwaner, “Historische, Geograpische en Statitieke Aanteekeningen Betreffende Tanah Boemboe”, *Tidjschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde* (Batavia: Lange & Co, 1853).

Pada tahun 1901, daerah landskap Tanah Bumbu diperintah oleh rajanya masing-masing atau *inlandsche bestuur*. Kemudian pada tanggal 20 April 1907, terjadi perubahan struktur pemerintahan di daerah Pagatan. Penguasa Arung Abdul Rahim mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan kerajaan Pagatan dan Kusan diserahkan kepada pemerintahan kolonial Belanda. Maka setelah empat tahun (1908-1912) pelaksanaan pemerintahan kerajaan Pagatan dan Kusan di bawah suatu

kerapatan atau *zelfbestuusraad*,⁷⁶ terhitung tanggal, 1 Juli 1912 kerajaan Pagatan dan Kusan dilebur dalam pemerintahan langsung Hindia Belanda atau *Rechtrees Bestuurgebied*.⁷⁷

Dalam kurun waktu tersebut, berdasarkan *Staatblad No. 329* tahun 1903 tentang *decentralisatiewet*, pemerintah Hindia Belanda mengatur keberadaan dan kelembagaan daerah otonom, yakni daerah yang dikuasai secara langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam *staatblad* ini juga diatur pendelegasian wewenang administratif hanya untuk pemerintahan daerah yang langsung ditangani oleh orang Eropa atau *Europoese Binnenlandsbestuur*.⁷⁸ Pada tahun 1936 Pemerintah Hindia Belanda menunjuk *controleur* untuk *onderafdeling* Pulau Laut dan Tanah Bumbu yakni P. van Hoeve. Kemudian pada tahun 1938 van Hoeve digantikan oleh C. Nagtegaal.⁷⁹

⁷⁶Dalam kerapatan tersebut Pemerintah Belanda menunjuk wakilnya, Pangeran Kapitan dan Daeng Soewidi. Lihat AM Noor, *op.cit.*, hlm.92.

⁷⁷Sistem pemerintahan Hindia Belanda di awal abad 20 dibagi atas tiga yakni *Rechtstreeks bestuurgebied* (pemerintahan langsung), *Zelfbesturend landschappen* (pemerintahan sendiri), *Stedehouder* (wakil pemerintahan Belanda).

⁷⁸Asep Suryana, “Dari Decentralisatiewet 1903 ke Pemerintahan Daerah 1965: Kesenambungan dan Perubahan Otonomi Daerah di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 055, Tahun Ke-II, Jdi 2005, hlm. 592-593.

⁷⁹ ANRI, P. van Hoeve (controleur); “Memorie van Overgave van de onderafdeling Poeloe Laoet en Tanah Boemboe, 1936” koleksi MvO Serie DL; C. Nagtegaal, (controleur); “Aanvullende Memorie van Overgave van de onderafdeling Poeloe Laoet en Tanah Boemboe, 1938.”, koleksi MvO Serie DL. hlm.1.

Perubahan kemudian terjadi pada tahun 1936, walaupun pada dasarnya masih menerapkan sistem pemerintahan sipil kolonial. Tanah Bumbu berubah status menjadi salah satu *onderafdeeling* yakni *onderafdeeling* Tanah Bumbu dan Pulau Laut, dibawah *Afdeeling* Banjarmasin. Selain *onderafdeeling* Tanah Bumbu dan Pulau Laut, *onderafdeeling* lain dibawah *afdeeling* Banjarmasin adalah Banjarmasin, Marabahan, Martapura dan Pleihari. *Onderafdeeling* Tanah Bumbu dan Pulau Laut membawahi beberapa distrik yakni Pagatan, Kusan, Cengal, Manunggal, Bangkalaan, Sampanahan, Cantung, Batulicin, Sebamban, Pulau Laut dan Pulau Sebuku. Tiap distrik dibawah seorang *civil gezaghebber* atau *kontrolir*. Wilayah *distrik* dikepalai oleh seorang kiai. Dibawah distrik dibagi lagi menjadi beberapa *onderdistrik* yang dikepalai oleh asisten kiai. Selanjutnya dibawah *onderdistrik* dibagi lagi menjadi beberapa *desa/kampoeng* yang dikepalai oleh seorang *pembekal* atau *pambakala*.⁸⁰

⁸⁰Pembagian ini berdasarkan *Bijblad op het Staatblad nederlandsch Indie*, Deel LXXVII Nos 14139-14310, dalam Syaharuddin, "Organisasi Islam di Borneo Selatan 1912-1942: Awal Kesadaran Berbangsa Urang Banjar" (Tesis Pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, sudah diterbitkan), hlm. 45-46.